



**STUDI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
DI MTs DARUSSALAM JEMBER TAHUN 2013**

*(RESEARCH OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) PROGRAM  
IMPLEMENTATION EFFECTIVITY IN MTs DARUSSALAM JEMBER IN 2013)*

**SKRIPSI**

Oleh

**Anas Romzy Hibrida  
NIM 070910201090**

Dosen Pembimbing I

Drs. Anwar, M.Si  
NIP 19630606198821001

Dosen Pembimbing II

Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si  
NIP 195805101987022001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2014



**STUDI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
DI MTs DARUSSALAM JEMBER TAHUN 2013**

*(RESEARCH OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) PROGRAM  
IMPLEMENTATION EFFECTIVITY IN MTs DARUSSALAM JEMBER IN 2013)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Anas Romzy Hibrida  
NIM 070910201090**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2014

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan membiayai kuliah saya,  
Drs. H. Imam Syafii Alwy dan Hj. Ummi Jawaroh, S.Pd
2. Adik Adik saya tercinta, Mayya, Balqis, Fara, dan Afif
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Sahabat seperjuangan Pengurus PPI Darussalam 2007 – 2014
5. Madrasah tempat mengabdikan cinta “MTs Darussalam Jember”

## **HALAMAN MOTTO**

Banyak kegagalan dalam hidup ini  
dikarenakan orang-orang tidak menyadari  
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah  
(Thomas Alva Edison)\*)

Tiada doa yang paling indah saat ini  
selain lekas skripsi dan wisuda  
(Anas Romzy Hibrida)

---

\*) Kata-kata mutiara Thomas Alva Edison dalam <http://kata-kata-mutiara.org/kata-kata-mutiara-1/kata-kata-mutiara-thomas-alva-edison/> dilihat pada 20 September 2014

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Anas Romzy Hibrida

NIM : 070910201090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember Tahun 2013” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Anas Romzy Hibrida  
070910201090

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember Tahun 2013” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2014

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris

Dr. Sutomo, M. Si

NIP 196503121991031003

Drs. Anwar, M.Si

NIP 196306061988021001

Anggota Tim Penguji :

1. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP 195805101987022001

(.....)

2. Dra. Inti Wasiati, MM  
NIP 195307311980022001

(.....)

3. Suji, S.Sos, M.Si  
NIP 197006152008121002

(.....)

Mengesahkan,  
Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 19520727 198103 1003

## RINGKASAN

**Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di MTs Darussalam Jember Tahun 2013;** Anas Romzy Hibrida, 070910201090; 2014; 128 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat modern menuntut bangsa-negara untuk menguasai informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sebagai salah satu negara dunia berkembang tentu memerlukan kesiapan dan kemampuan anggotamasyarakatnya berupa daya adaptasi dengan nilai-nilai baru, daya saing/kompetisi, dan kreativitas untuk dapat eksis di era peradaban informasi.

Pendidikan merupakan pilihan strategis untuk melakukan proses perubahan sosial menuju masyarakat yang cerdas, beradab, adil, makmur dan sejahtera. Pendidikan berfungsi membentuk watak peradaban sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat. Untuk itu, pemerintah menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Sebagai upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember dan hambatan hambatan yang terjadi dalam implementasi program tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Bruce W. Tuckman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS berjalan cukup efektif. Dari segi input program BOS menunjukkan bahwa

kualitas SDM, Penerimaan Siswa Baru, Peningkatan kemampuan tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan dan peraturan terkait berjalan cukup efektif dari pemanfaatan dana BOS. Segi Proses menunjukkan bahwa Implementasi program BOS dijalankan dan dilaporkan sesuai Juklak dan Juknis. Dari segi output menunjukkan bahwa dengan adanya dana BOS dapat meringankan biaya peserta didik, meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik.

Hambatan yang masih muncul dalam implementasi Program BOS ini adalah minimnya sosialisasi dari pihak madrasah selaku pengelola dana BOS, Pencairan dana BOS yang sering terlambat, serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi program yang tidak dilakukan secara berkala. Beberapa kebijakan dirasa perlu untuk memperbaiki dan meminimalisir hambatan yang terjadi dalam Implementasi Program BOS agar dapat berjalan efektif.

**Kata kunci: Efektivitas, Implementasi Kebijakan, Program BOS**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul “Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah BOS di MTs Darussalam Jember Tahun 2013”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu administrasi negara dan guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta Pembimbing kedua yang sudi meluangkan waktunya untuk memberi nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. Anwar, M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan petunjuk dan arahnya sebagai koreksi dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan masukan dan bimbingan selama kuliah.
6. Dr. Sutomo, M. Si selaku Penguji utama skripsi yang telah bersedia menguji dan membimbing selama revisi skripsi berlangsung.
7. Dr. Inti Wasiati, M.M selaku Anggota penguji skripsi yang telah bersedia menguji dan membimbing selama revisi skripsi berlangsung.
8. Suji, S. Sos, M.Si selaku Anggota penguji skripsi yang telah bersedia menguji dan membimbing selama revisi skripsi berlangsung.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu selama aktif kuliah.

10. Para pegawai dari kemahasiswaan dan akademik yang telah banyak meluangkan waktu , membantu dan menyemangati.
11. Pak Mul selaku operator yang sudah membantu dan beri petunjuk saya selama proses penyelesaian skripsi.
12. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Islam Darussalam, Nyai Hj. Maliha Abdusshomad, KH. Muhyiddin Abdusshomad, KH. Ahmad Mahdi, F.M, Nyai Hj. Falzah Umayyah Zubaidah, KH. Abdurrahman Fathoni, Kyai Hafidzul Kais
13. Sahabat KG Super Thief Cat (Vita, Edo, Manda, Nunik, Karim, Yani, Arief, Suryo, dkk)
14. Sahabat The Arsy (Bu Ani, Dissy, Tantri, Lek Sukir, Lexus, Rini, Gusti, Elan, Iqbal dkk) yang selalu bikin ramai, pusing dan ketawa.
15. Teman 2007 yang tersisa “ayo semangat”.
16. Sahabat seperguruan, Ayyub, Wahid, Anwar, Lukito, Tofa, Fanny, Thoil, Athoillah, dkk
17. Sahabat saya Siti Aminatin yang selalu mensupport penyelesaian skripsi saya.
18. Dan semua pihak yang telah membantu, baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lainnya demi kelancaran skripsi ini “TERIMA KASIH”.

Semoga segala kebaikan yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 02 Oktober 2014

Penyusun

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Pedoman Wawancara dan Transkrip Wawancara
- B. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dari Kemenag.
- C. Surat ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- D. Surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian di MTs Darussalam Jember.
- E. Dokumentasi Laporan BOS MTs Darussalam Jember
- F. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	15
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Konsep Dasar .....	17
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	18
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan.....	21
2.4 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	22
2.5 Konsep Efektifitas Implementasi .....	26
2.6 Konsep Program .....	28
2.7 Program Bantuan Operasional Sekolah.....	31
2.7.1 Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	31
2.7.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah.....	32
2.7.3 Sasaran Program dan Besar Bantuan .....	32

2.7.4	Landasan Hukum .....	33
2.7.5	Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	35
2.8	Tinjauan Peneliti Terdahulu .....	38
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....		<b>40</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	40
3.2	Fokus Penelitian .....	42
3.3	Lokasi Penelitian .....	45
3.4	Penentuan Informan .....	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5.1	Observasi partisipatoris .....	49
3.5.2	Wawancara Mendalam (in depth interview) .....	50
3.5.3	Studi Dokumentasi .....	52
3.5.4	Studi Kepustakaan .....	52
3.6	Teknik Validasi Data .....	53
3.7	Metode Analisis Data .....	55
<b>BAB 4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b> .....		<b>59</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Profil Kecamatan Patrang .....	59
4.2	Profil Sekolah .....	60
4.2.1	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darussalam Jember .....	60
4.3	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	64
4.3.1	Sasaran Program dan Besar Bantuan .....	64
4.3.2	Waktu Penyaluran Dana .....	65
4.3.3	Jenis biaya pendidikan .....	65
4.3.4	Madrasah Penerima BOS .....	66
4.3.5	Program BOS dan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu .....	67
4.3.6	Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah .....	68
4.3.7	Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik .....	68

4.3.8	Mekanisme Alokasi.....	68
4.3.9	Penggunaan Dana BOS.....	69
4.3.10	Larangan Penggunaan Dana BOS.....	70
4.4	Hasil Penelitian.....	72
4.4.1	Segi Pencapaian Masukan / Input.....	73
4.4.2	Segi Pencapaian Proses.....	76
4.4.3	Segi Pencapaian Hasil / Output.....	77
4.5	Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan BOS.....	80
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
4.6.1	Pencapaian Masukan (Input).....	81
4.6.2	Pencapaian Proses.....	94
4.6.3	Pencapaian Hasil (Output).....	95
4.7	Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BOS.....	97
4.7.1	Sosialisasi Program BOS.....	98
4.7.2	Pencairan Dana BOS.....	99
4.7.3	Monev tidak berkala.....	100
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>103</b>
5.1	Kesimpulan.....	103
5.2	Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>109</b>

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Salah satu masalah yang berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian Indonesia adalah masalah pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi pula martabat orang tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia juga dipengaruhi oleh pendidikan penduduknya. Bangsa yang pendidikan penduduknya rata-rata rendah maka dimata dunia martabat bangsa tersebut juga rendah. Namun sebaliknya apabila pendidikan penduduk suatu bangsa semakin tinggi, maka martabat bangsa tersebut juga tinggi. Bahkan bangsa-bangsa lain akan memperhitungkan bangsa tersebut. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan harkat/ martabat bangsa-bangsa Indonesia tak hentihentinya berupaya agar seluruh penduduknya mengenyam pendidikan. Seiring dengan berkembangnya waktu, pendidikan mendapat sorotan utama sebagai objek yang ditengarai menjadi penyebab lemahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam membangun suatu bangsa. Terlebih lagi di era globalisasi dewasa ini yang penuh dengan berbagai tantangan dan persaingan yang semakin meningkat. Persaingan dalam dunia kerja belakangan ini semakin ketat dan sulit, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era informasi global, hampir di setiap sektor kehidupan kita dituntut untuk menggunakan kemampuan intelegensi dalam menginterpretasi, menyelesaikan masalah, ataupun untuk mengontrol proses komputer. Kebanyakan lapangan kerja dewasa ini lebih banyak menuntut kemampuan berpikir seperti menganalisis,

mengevaluasi dan menggeneralisasi daripada keterampilan mekanistik. Selain itu kemampuan yang bersifat afektif seperti disiplin, tekun, penuh tanggung jawab, produktif, dan mau bekerja keras juga merupakan watak yang harus dimiliki tenaga profesional. Oleh karena itu, sumber daya manusia Indonesia pada gilirannya nanti harus mampu bersaing di arena global dalam bursa tenaga profesional yang strategis bukan dalam bursa tenaga buruh rendah. Di era informasi, ada tiga kekuatan yang dominan: 1) ilmu pengetahuan, 2) teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, 3) informasi. Ketiga dominasi kekuatan ini tidak mengenal batas-batas teritorial bangsa dan negara, kekuatannya bagaikan arus gelombang yang tidak ada yang dapat menghentikan dan menghambatnya.

Perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat modern menuntut bangsa-negara untuk menguasai informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang tidak menguasainya maka dengan sendirinya akan tersingkir oleh bangsa-negara maju yang menguasai gelombang peradaban informasi. Indonesia sebagai salah satu negara dunia berkembang tentu memerlukan kesiapan dan kemampuan anggota masyarakatnya berupa daya adaptasi dengan nilai-nilai baru, daya saing/kompetisi, dan kreativitas untuk dapat eksis di era peradaban informasi. Pendidikan adalah media strategis untuk melakukan transformasi sosial dalam menyiapkan *human resources* yang cerdas, dinamis, progresif, inovatif-kreatif.

Menurut Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan pilihan strategis untuk melakukan proses perubahan sosial menuju masyarakat yang cerdas, beradab, adil, makmur dan sejahtera. Pendidikan berfungsi membentuk watak peradaban sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat. Menjadikan pendidikan

sebagai agenda utama kebijakan pemerintah adalah pilihan strategis untuk menghadapi tantangan arus peradaban informasi.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal yang *urgent* dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dari berbagai amanat peraturan perundang undangan di atas, pemerintah yang terkena konsekuensi sebagai penyelenggara pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Kedua kementerian tersebut wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat semisal madrasah. Semua anak bangsa dalam kategori apapun harus merasakan pendidikan, baik itu kaya, miskin, pintar, atau bodoh

sekalipun. Adapun selain itu, pemerintah harus memperbesar alokasi dana APBN dan APBD untuk pemberian fasilitas sekolah bagi SD dan SMP sederajat.

Perwujudan Indonesia menuju Indonesia yang cerdas dan bebas buta aksara, hingga saat ini terkendala dengan banyak permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti kualifikasi mutu tenaga pengajar, sarana dan fasilitas sekolah yang tidak memadai untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta minimnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Pendidikan menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan baik formal maupun non formal. Dengan demikian sektor pendidikan hendaknya mampu merancang pendidikan untuk masyarakat yang memenuhi kemajuan dari waktu ke waktu. Sistem pendidikan nasional juga hendaknya memperhatikan kriteria yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai.

Seperti dilaporkan *United Nations Development Program* (UNDP), menempatkan IPM Indonesia berada pada urutan ke 124 dari 187 negara yang disurvei. Laporan tersebut dirilis pada 2 November 2013 lalu. Menurut laporan itu, IPM Indonesia hanya 0,617. Peringkat Indonesia jauh dibawah negeri tetangga, Malaysia yang berada pada posisi 61 dunia dengan angka 0,761. Laporan itu juga menyebutkan IPM Indonesia tertinggal di semua sektor jika dibanding Malaysia. Untuk indeks kesehatan misalnya, salah satu yang indikatornya adalah angka harapan hidup. Harapan hidup orang Indonesia rata-rata adalah 69,4 tahun. Sedangkan Malaysia 74,2 tahun. Begitu juga dengan indeks pendidikan, indikator angka harapan rata-rata tahun sekolah orang Indonesia hanya 0,584, jauh dibawah Malaysia 0,730. (<http://news.okezone.com/read/2013/11/10/337/527526/ipm-indonesia-rendah-tampanan-bagi-pemerintah> yang diakses pada 31 Januari 2013)

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) ([http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia) yang diakses pada 31 Januari 2013) IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.ada tiga dimensi yang dilihat dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia.

Indikator sederhana namun ternyata memiliki implikasi serius inilah menjadi sebuah kenyataan yang menohok pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

Pemerintah dalam penanganannya harus serius melakukan upaya perbaikan untuk menjadi lebih baik melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 - 2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui Peningkatan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan dasar.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini didorong oleh rendahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang beberapa kurun waktu terakhir ini mengalami kenaikan bahkan subsidi BBM akan segera dihapuskan dengan mengkonversi BBM menjadi Bahan Bakar Gas (BBG), sehingga masyarakat yang kurang mampu semakin terjepit oleh keadaan ekonomi Indonesia.

Tabel 1.1 Program kompensasi pengurangan subsidi BBM se Indonesia Tahun 2005

No	Program	Sasaran	Pelaksana	Dana (Dalam Milyar)
1.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM)	Bos mencakup 28.779.709 siswa SD/MI ; 108.177 siswa SD Salafiyah ;10.625.816 siswa SMP/MTs, BKM mencakup 114.433 siswa SD/MI, dan 698.458 siswa SMA/SMK/MA/SMALB	Kemendikbud, Kemenag	6.271,90
2.	Jaminan Pelayanan Kesehatan	36,1 juta penduduk miskin	Kemenkes	3.875,20
3.	Infrastruktur Pedesaan	12.834 desa (termasuk desa tertinggal)	Kemen PU	3.342,10
4.	Subsidi Langsung Tunai	15,5 juta keluarga miskin	Kemen Sos	4.650,00
<b>Jumlah</b>				18.139,20

Sumber: [www.bpkp.co.id](http://www.bpkp.co.id) diunduh pada tanggal 5 Februari 2013

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, pada awalnya pemerintah telah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut yaitu dipergunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni sebesar 20 % dari APBN.

Program ini disalurkan kepada sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program untuk memperoleh dana bantuan tersebut. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTs/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta Program ini dimulai pelaksanaannya pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran

2005/2006 lalu oleh KEMENDIKNAS untuk sekolah umum dan KEMENAG untuk madrasah sebagai pelaksana.

BOS yang pada awalnya menuai kontroversi karena menyebabkan pengurangan subsidi BBM, nyatanya justru menjadi tombak baru yang mendorong kemajuan di bidang pendidikan, dan pada akhirnya dapat tuntas dilaksanakan walaupun secara bertahap dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Dalam buku panduan BOS, 2013:1 dinyatakan bahwa Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun, diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat MTs/ sederajat. Pada tahun 2009 APK nasional tingkat SMP/ sederajat rata-rata telah mencapai 98,11% dan Kementerian Agama telah memberikan kontribusi sebesar 21,97% untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/PPS Wusta serta 12,44% untuk tingkat MI/PPS Ula. Dengan APK ini berarti program Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan dan menunjukkan bahwa Pemerintah melalui program BOS sejak tahun 2005 telah berhasil mempercepat target program Wajib Belajar 9 Tahun.

Tabel 1.2 Jumlah siswa sasaran program dan alokasi dana BOS se Indonesia

Tahun	Jumlah Siswa Sasaran Program	Alokasi APBN
2007	39,3 juta siswa	Rp. 5,14 triliun (hanya 1 semester)*
2008	39,7 juta siswa	Rp. 10,28 triliun*
2009	35,2 juta siswa	Rp. 9,84 triliun**
2010	35,9 juta siswa	Rp. 10,01 triliun
2011	36,2 juta siswa	Rp. 16,04 triliun
2012	36,5 juta siswa	Rp. 16,52 triliun
2013	36,7 juta siswa	Rp. 16,26 triliun

Keterangan : \*termasuk madrasah/ponpes  
\*\*mulai dipisah dari madrasah dan ponpes

Sumber : [www.smeru.org](http://www.smeru.org) diunduh pada 5 Februari 2013

Dengan keberhasilan program BOS tersebut, mulai tahun 2009 Pemerintah mengarahkan tujuan program BOS pada upaya peningkatan mutu pendidikan dasar, disamping untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian APK nasional. Dalam konteks inilah, maka pemerintah menaikkan anggaran untuk Program BOS

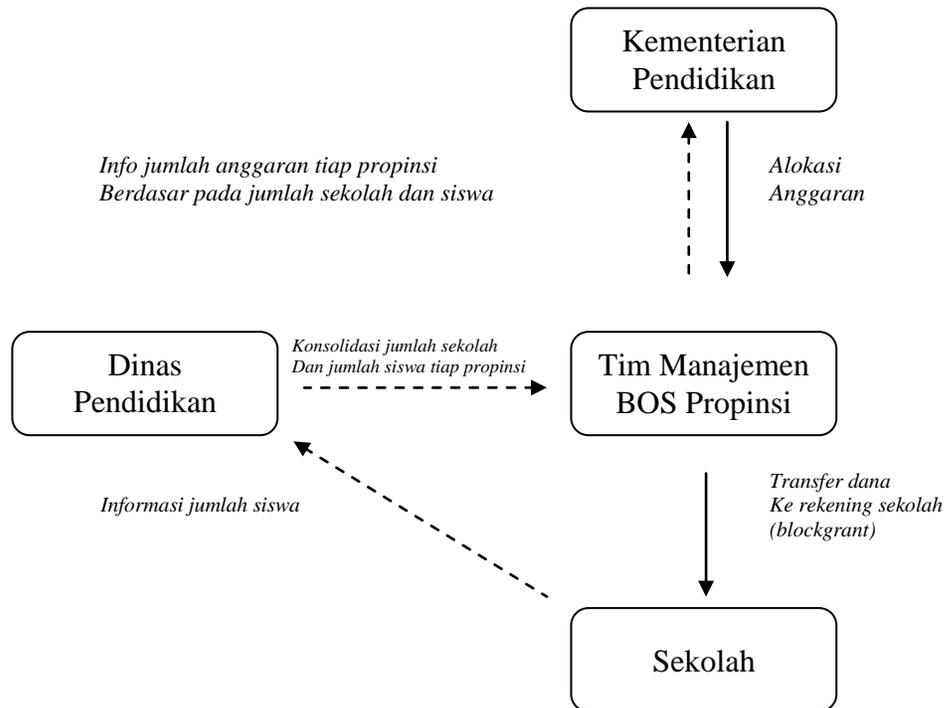
tahun 2014. Kita berharap dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, madrasah/PPS memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Dalam pelaksanaan program BOS, ada beberapa mekanisme pelaksanaan program yang harus dilakukan oleh pihak sekolah yaitu penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS. Mekanisme pelaksanaan tersebut harus dilakukan secara efektif oleh sekolah-sekolah penerima dana BOS sesuai dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Namun dalam perkembangannya, mekanisme penyaluran Dana BOS berubah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, pada tahun anggaran 2011 dan 2013 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah. (Kemenag, 2011:298)

Pada Tahun 2005 – 2010, dana BOS disalurkan langsung dari Dinas Pendidikan Propinsi ke rekening sekolah (sistem dekonsentrasi). Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Gambar 1.1 Alur penyaluran dana BOS melalui mekanisme dekonsentrasi



Sumber: Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah (2013)

Menurut Kemenag dalam Peningkatan Manajemen Melalui Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah, Adapun implementasi kebijakan dalam alur seperti di atas mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

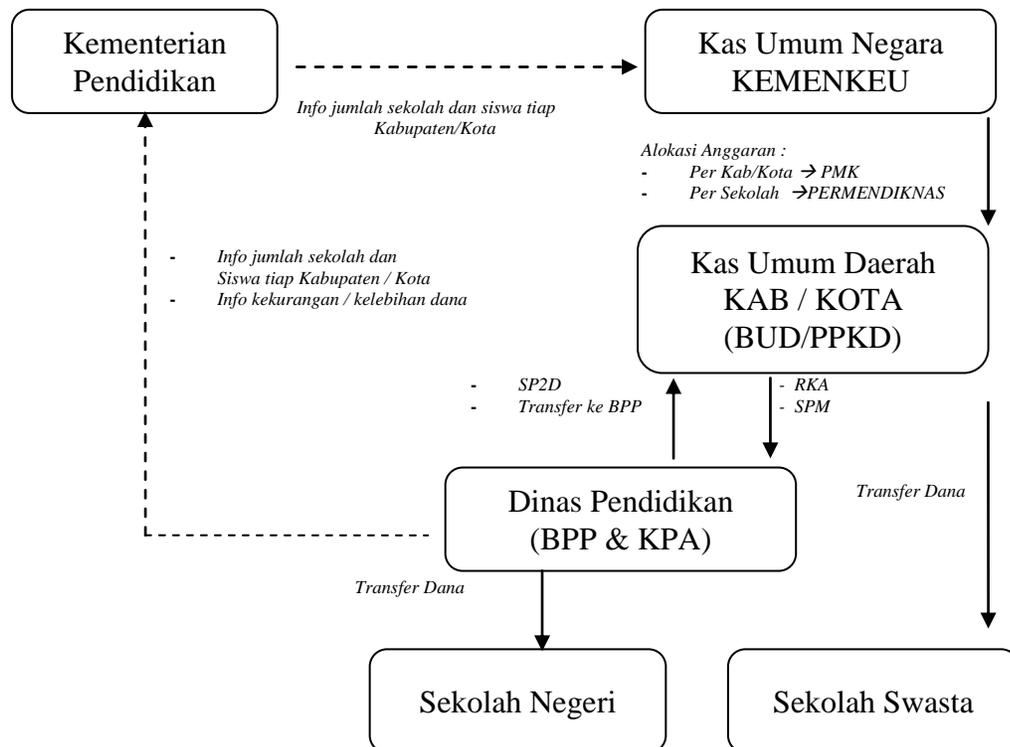
1. Perencanaan mudah dan cepat karena di alokasikan via DIPA Propinsi
2. Penyaluran dana ke sekolah cepat dan seragam antara sekolah negeri dengan swasta
3. Dana disalurkan sebagai hibah
4. Peran Pemerintah Propinsi dominan
5. Monitoring dan Evaluasi mudah dan cepat

Sedangkan kelemahan yang dimiliki sistem tersebut adalah :

1. Belum memenuhi amanat PP 38/2007 (urusan pendidikan dasar adalah kewenangan Kabupaten/ Kota)
2. Peran Kabupaten/ Kota minim
3. Tidak ada sinkronisasi BOS dengan program PEMDA Kab./ Kota

Sedangkan pada tahun 2013, dana BOS disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dari Kasda ke Rekening Sekolah. Mekanisme transfer ke daerah melalui dana penyesuaian 2013 dan Dana Alokasi Khusus yang masuk dalam dana perimbangan dan dana penyesuaian. Dana penyesuaian 2013 adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai dengan peraturan perundangan.

Gambar 1.2 Alur penyaluran dana BOS melalui mekanisme Dana Penyesuaian 2013



Sumber: Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah (2013)

Keuntungan yang diperoleh dari sistem di atas adalah Kabupaten / Kota dapat berperan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme BOS, sedangkan kelemahan yang terdapat pada alur penyaluran dana BOS seperti di atas adalah keterlambatan pencairan dana BOS di daerah.

Dalam prakteknya, Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua sekolah tingkat SD dan sederajat dan tingkat SMP dan sederajat dengan total anggaran dan jumlah penerima pada triwulan pertama tahun 2013 sebesar sebesar Rp12,88 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 72.423 siswa, sedangkan anggaran BOS SD sebesar Rp31,16 miliar dengan penerima sebanyak 214.902 siswa. ([http://www.mediaindonesia.com/read/2013/01/01/292847/289/101/Dana\\_BOS\\_Jember\\_Cair](http://www.mediaindonesia.com/read/2013/01/01/292847/289/101/Dana_BOS_Jember_Cair) yang di akses pada 30 Januari 2013).

Dalam implementasi program BOS perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan. Berkaitan dengan itu, maka evaluasi dilakukan oleh tim yang telah dibentuk di Kabupaten Jember. Adapun tugas tugas dari tim tersebut dalam evaluasi adalah :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi tim secara berkala
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS Kabupaten Jember
3. Menanggapi pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan program BOS Kab. Jember
4. Melakukan supervise secara berkala tentang penyelenggaraan program BOS Kab. Jember baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan lembaga lembaga sekolah.
5. Melaporkan hasil pelaporan pelaksanaan kepada tingkat pusat.

Untuk mengetahui efektivitas implementasi program tersebut, maka harus diketahui dan dilihat dari teori evaluasi yang akan digunakan yaitu teori evaluasi

milik Bruce W. Tuckman dengan pendekatan pada input, proses dan output. Sehingga dapat diketahui secara persis kendala per tahapan implementasi tersebut untuk dilakukan evaluasi ke depan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 3.293,34 km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten penerima dana BOS. Dengan adanya program BOS diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jember secara merata. Salah satu sekolah penerima dana BOS di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jember di Wilayah Kabupaten Jember adalah MTs Darussalam Jember

Madrasah tersebut merupakan madrasah yang terdapat di Kabupaten Jember yang tepatnya di Kecamatan Patrang dan berdekatan dengan Kantor Bupati Jember. Madrasah MTs Darussalam berada di dekat jantung kota (Kelurahan Jember Lor) namun kebanyakan orang tua siswa di madrasah tersebut mayoritas bekerja sebagai buruh tani, tukang becak dan kuli bangunan, sehingga dalam hal segi ekonomi kurang ada minat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. (Data Base MTs Darussalam 2012) Bagi pelaku ekonomi seperti mereka, madrasah ini menjadi pilihan karena MTs Darussalam ini menggratiskan biaya pendidikan dalam publikasi penerimaan siswa baru. Dengan adanya program BOS masuk ke madrasah ini diharapkan anak-anak sekitar yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya jadi bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya lagi dan diharapkan juga bisa meningkatkan kualitas madrasah tersebut.

Pemilihan MTs Darussalam Jember menjadi objek penelitian didasarkan pada subjektifitas dan objektifitas. Adapun MTs Darussalam diteliti karena secara subjektif peneliti menjadi staf pengajar di madrasah tersebut, sehingga peneliti mengetahui secara langsung proses implementasi BOS di sekolah tersebut. Secara objektif, peneliti melihat adanya kendala dalam implementasi program BOS di MTs Darussalam. Sehingga yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak madrasah menjadi tidak terlaksana. misalnya pada beberapa variabel implementasi kebijakan, pada tahap

komunikasi mengalami kendala baik dalam hal kejelasan pandangan penggunaan dana BOS yang sepenuhnya diatur dan diserahkan pihak madrasah, hingga konsistensi pedoman pelaksanaan. Sumberdaya diduga juga belum maksimal, fasilitas pendukung pelaporan seperti halnya komputer khusus pelaporan BOS belum terwujud. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan dengan jumlah total 80 anak di madrasah tersebut ke depan sehingga dalam penilaian kelembagaan pendidikan MTs Darussalam mendapat nilai akreditasi B. Atas beberapa pertimbangan tersebutlah, peneliti tertarik untuk meneliti madrasah MTs Darussalam.

Tabel 1.3 : Jumlah Madrasah, Guru, Murid MTs Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2012

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Madrasah	Guru	Murid	Madrasah	Guru	Murid
1	Kencong	1	25	489	2	38	449
2	Gumukmas	--	--	--	5	38	720
3	Puger	--	--	--	7	110	764
4	Wuluhan	--	--	--	4	78	718
5	Ambulu	--	--	--	4	82	1.609
6	Tempurejo	--	--	--	3	62	788
7	Silo	--	--	--	5	84	585
8	Mayang	--	--	--	7	49	615
9	Mumbulsari	--	--	--	1	17	369
10	Jenggawah	--	--	--	5	74	864
11	Ajung	--	--	--	5	49	720
12	Rambipuji	--	--	--	6	79	964
13	Balung	--	--	--	6	258	2.795
14	Umbulsari	1	22	304	2	33	368
15	Semboro	--	--	--	3	26	157
16	Jombang	--	--	--	4	37	274
17	Sumberbaru	1	21	382	5	67	385
18	Tanggul	1	29	382	2	26	142
	Bangsalsari (MTsN						
19	Bangsalsari)	1	17	202	5	88	938
20	Panti	--	--	--	4	53	618
21	Sukorambi	--	--	--	2	30	393
	Arjasa (MTsN						
22	Arjasa)	1	7	168	--	--	--
23	Pakusari	--	--	--	--	--	--

24	Kalisat	--	--	--	3	47	568
25	Ledokombo	--	--	--	2	42	517
26	Sumberjambe	--	--	--	4	61	275
27	Sukowono	1	22	322	3	46	198
28	Jelbuk	--	--	--	4	70	415
29	Kaliwates	1	31	636	5	82	537
30	Sumpalsari	--	--	--	2	34	350
	Patrang (MTsN)						
31	Jember II)	1	33	813	4	73	468
	Jumlah	9	207	3.698	114	1881	18.563

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 2012 diunduh pada 6 Februari 2013

Program BOS di MTs Darussalam, secara konsep diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi kenyataan implementasi dilapangan belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Walaupun sesungguhnya pihak MTs Darussalam berupaya penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi biaya pendidikan seminimal mungkin. Namun terkendala disebabkan banyaknya mekanisme penggunaan dan larangan penggunaan dana BOS membuat pihak sekolah sulit membelanjakan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah tersebut, termasuk ketentuan ketentuan pembelian buku yang telah ditentukan di dalam juknis BOS. Belum lagi keterlambatan pencairan BOS yang terkesan disengaja oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Dengan dasar latar belakang tersebut dengan memperhatikan penjelasan dan pertimbangan-pertimbangan yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sejauh mana MTs Darussalam Jember melakukan efektifitas implementasi dalam implementasi program BOS dari pemerintah tersebut. Untuk itu, dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul **“Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember Tahun 2013”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Penelitian selalu membutuhkan rumusan-rumusan masalah yang hendak diteliti sehingga perumusan masalah dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat penting, karena dalam perumusan masalah secara tegas dan jelas dapat memberikan gambaran mengenai apa yang ingin diteliti oleh penulis. Rumusan masalah hendaknya bias sekaligus memberikan bayangan tentang bagaimana masalah tersebut akan dijawab dalam penyajian hasil penelitian nantinya. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban (Lincoln dan Guba, dalam Moleong, 2009:93).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) dan hambatan hambatan yang terjadi dalam proses implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di MTs Darussalam Kabupaten Jember Tahun 2013?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Sutrisno Hadi (1990:3) menyatakan bahwa, *Research*, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka dari itu, rencana penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) dan hambatan hambatan yang terjadi selama proses implementasi berlangsung di MTs Darussalam Kabupaten Jember Jember dalam tahun 2013.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut.

1. Akademik.

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian.

2. Praktis.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi MTs Darussalam Jember Kabupaten Jember dalam mengevaluasi implementasi program yang diberikan sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan lembaga pendidikannya. Bagi pihak lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk melaksanakan program yang lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

3. Pribadi.

Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang telah diterima dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Dasar**

Konsep sebagai adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Konsep merupakan ekspresi suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.

Pembahasan terhadap masalah dalam penelitian jelas membutuhkan suatu konsep atau pandangan yang benar. Fenomena yang akan diteliti dapat di deskripsikan secara tepat dengan menggunakan konsep. Dalam penelitian sosial sendiri banyak menggunakan konsep abstrak untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Penggunaan konsep akan menyederhanakan pemikiran dengan penggunaan istilah istilah untuk peristiwa yang berkaitan. Konsep harus dimengerti sedari awal untuk memahami sebuah teori.

Menurut Effendi (Ed, 1995:34) konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi bertambah penting karena realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka konsep dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Konsep Kebijakan Publik;
2. Konsep Implementasi Kebijakan;
3. Konsep Evaluasi Kebijakan;
4. Konsep Efektivitas Implementasi ;
5. Konsep Program;
6. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

## 2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah:

*“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo”.*

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan, seperti dikutip Riant Nugroho, mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik praktik tertentu.

Nugroho (2007:24) merumuskan kebijakan publik secara lebih sederhana, bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik di masyarakat yang memiliki banyak macam variasi dan intensitas permasalahannya. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk memikirkan dan mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Masalah publik sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan, oleh karenanya, di dalam kebijakan terdapat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan beberapa input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Proses pembuatan kebijakan publik berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur yang kompleks, subjek, dan objek yang berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif-motif majemuk. Hal ini bisa terjadi karena proses pembuatan kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis-teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis, dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks.

Friedrich menjelaskan tentang kebijakan : Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2005:3)

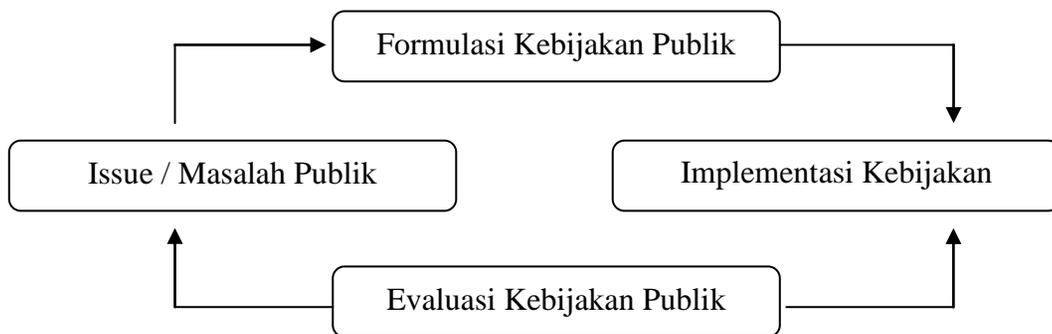
James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sedangkan menurut Subarsono (2005:2), kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu,

misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2005:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut.

- “1. *Penyusunan agenda (agenda setting)*, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. *Formulasi kebijakan (policy formulation)*, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. *Pembuatan kebijakan (decision making)*, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. *Implementasi kebijakan (policy implementation)*, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. *Evaluasi kebijakan (policy evaluation)*, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.”

Gambar 2.2.1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik



Sumber: Subarsono (2005)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk memecahkan masalah publik dengan disertai indikator yang jelas dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai kebijakan tersebut.

Pada tahapan proses kebijakan publik di atas dalam tahap formulasi kebijakan para pembuat keputusan harus dapat menganalisis persoalannya terlebih dahulu sebelum mencari solusinya. Dalam kasus ini, masalah kualitas pendidikan di

Indonesia menjadi *agenda setting* yang kemudian akan dibuat formulasi kebijakan yang tepat.

Setelah melalui tahap tersebut, maka kebijakan publik yang telah diputuskan ini akan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Ini merupakan tahap implementasi kebijakan.

### **2.3 Konsep Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi sendiri diartikan sebagai sebuah proses interaksi antar penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut atau dengan kata lain suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Dalam proses implementasi kebijakan, suatu kebijakan akan diinterpretasikan menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Agar lebih operasional, program dirumuskan menjadi proyek, selanjutnya diikuti dengan tindakan nyata / fisik. Sehingga akhirnya kebijakan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek, atau akibat) yaitu output dan dampak. Dalam proses implementasi ini juga akan dijabarkan kedalam tahap-tahap yang lebih operasional, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan akan mencapai keberhasilan atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan, antara lain: (Widodo, 2008:90)

1. Tahap Interpretasi

Merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.

2. Tahap Pengorganisasian

Merupakan usaha untuk koordinasi dan pengendalian / kontrol yang disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan

kebijakan tersebut. Mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan dalam implementasi kebijakan, yakni :

- a. Pelaksana kebijakan
- b. Standar prosedur operasi
- c. Sumber daya keuangan
- d. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan
- e. Penetapan jadwal kegiatan

### 3. Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Dengan adanya penjabaran tersebut, maka akan semakin mempermudah pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah per tahap dalam proses implementasi tersebut dilakukan, maka terakhir yang akan dilaksanakan adalah evaluasi dari kebijakan tersebut.

## 2.4 Konsep Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektifitas dampak kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang undangan yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun telah melahirkan konsekuensi amanat undang undang tersebut, yakni upaya peningkatan bidang pendidikan. Kebijakan tersebut pada akhirnya melahirkan kebijakan program baru yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian pelaksanaan program tersebut perlu adanya evaluasi kebijakan agar dapat mengetahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan tersebut terhadap sector publik.

Evaluasi sering diartikan secara sempit dan kurang pas. Masih banyak yang memandang evaluasi hanya berdasarkan aktifitasnya yang penting dan menonjol saja. Salah satu kesalahan yang sering terjadi, misalnya, evaluasi dipandang sebagai testing, atau sekedar penilaian saja. Secara mendasar evaluasi dipandang oleh para

ahli dari segi ontologi, epistemologi dan metodologi. Berikut ini diberikan definisi evaluasi untuk dapat dijadikan acuan atau perbandingan.

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Evaluasi menurut Subarsono (2005:119) adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Mustopadidjaja (dalam LAN, 2008:17) mengatakan bahwa evaluasi adalah:

*“pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi harus dilakukan dengan seteliti mungkin sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik mengenai system dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri. Informasi yang dihasilkan dari suatu kegiatan evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal agar perumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan baik, dan dengan demikian tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal”.*

Menurut (<http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi> yang diakses pada 05 Februari 2013), evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Sedangkan menurut MacIcolm, Provus (dalam Tayibnapi, 2000:3), mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Sedangkan

Menurut Subarsono (2005:120-121), evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

5. *Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dengan pencapaian target.*
6. *Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan yang lebih baik.”*

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antaraharapan dan kenyataan.

Tuckman (dalam Julia, 2010:19) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2003:185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan suatu program. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa argument perlunya evaluasi menurut Subarsono (2005:123).

- “1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektifitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada public sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.”

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2005:126) mencakup lima indikator sebagai berikut (table 2.4.1).

Tabel 2.4.1 Indikator evaluasi kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Subarsono 2005:12

Evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, seperti program, orang, produk, dan sebagainya (Tayibnaxis, 2000:4). Menurut Rossi & Freeman (dalam Keban, 2004:74),

*“evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya,.... Evaluasi tidak saja berguna untuk menjastifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektifitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut”.*

Untuk kelangsungan implementasi kebijakan, pada akhirnya perlu pengembangan evaluasi, pengembangan evaluasi ditujukan untuk kesiapan informasi tentang program program pembangunan agar dapat mencapai sasaran utama yang ditujukan dapat mengendalikan sasaran itu secara prosedural sesuai dengan rencana dan program sehingga dengan diadakannya evaluasi diharapkan agar penentu kebijakan memperoleh informasi tentang pelaksanaan program dan hasilnya, yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan termasuk apakah perlu menambah, mengurangi atau bahkan mengubah program yang ada.

Ada dua model evaluasi menurut Singarimbun, 2005:5:

1. *Evaluasi Formatif*

*Evaluasi yang dilakukan ketika program/ kebijakan sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan.*

2. *Evaluasi Sumatif*

*Evaluasi yang berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai.*

## **2.5 Konsep Efektifitas Implementasi**

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena faktor lain yang tidak

diduga seperti perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program adalah dengan efektivitas.

Efektifitas dilihat dari aspek organisasi dan manajemen berarti keberhasilan atau kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sasaran organisasi yang diukur berdasarkan pendekatan proses dan hasil. Nugroho, 2003:179 dalam Hirawan 2013:27 mengemukakan bahwa efektifitas implementasi kebijakan mencakup empat tepat yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya, dan tepat lingkungannya. Implementasi kebijakan dinyatakan efektif jika prosesnya dilaksanakan secara normatif dan hasilnya mencapai tujuan yang dikehendaki.

Efektifitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2009:4), efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan menurut UNDP (dalam LAN, 2008:33), efektifitas yaitu bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin. Jadi efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sesuai yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon (dalam artikel <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21347/4/Chapter%20II.pdf>) yang diakses tanggal 06 Februari 2013), efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan caramembandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan outputrealisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OA) \geq (OS)$  disebut efektif. Jadi suatu program dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan di lapangan lebih besar atau sama dengan peraturan maupun pedoman yang telah ditentukan.

Efektivitas program dinilai tidak hanya dari keberhasilan program tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang diembannya. Sejalan dengan peningkatan kuantitas program, sebagai wujud dari hasil yang dicapai program (outputs), akan ada perubahan-perubahan pada kelompok sasaran yang mengiringinya. Meningkatnya mutu pendidikan merupakan salah satu perwujudan manfaat dari program BOS. Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kaitannya dengan hal tersebut, Jika yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam proses mengimplementasikan program sesuai dengan buku panduan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditetapkan Kementerian Agama, dengan diukur dan dianalisa keefektifannya sesuai dengan teori Bruce W Tuckman terkait input, proses dan output, maka implementasi program BOS di MTs Darussalambisa dikatakan efektif. Begitu juga berlaku sebaliknya.

## **2.6 Konsep Program**

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Dan evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program. Ada dua pengertian untuk istilah program, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana. Sedangkan secara khususnya, apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi kebijakan maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. (<http://kojingtكنولوج.wordpress.com/2010/09/14/evaluasi-program-pendidikan/> diakses tanggal 06 Februari 2013)

Dalam pelaksanaan proses program diperlukan adanya keterlibatan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga program memberikan hasil yaitu perubahan kualitas pendidikan masyarakat. Tanpa memberikan manfaat kepada

masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Program juga harus memiliki pelaksana yang meliputi organisasi maupun pengawasan dalam proses pelaksanaan.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama.

Program merupakan sistem. Sedangkan, sistem adalah satu kesatuan dari bagian atau komponen program yang saling kait-mengait dan bekerjasama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sistem.

Dengan begitu, program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam sebuah program harus dimuat berbagai aspek (Tangkilisan, 2005 : 219 dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17736/4/Chapter2.pdf>, download 06 Februari 2013 ), yaitu :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai,

Setiap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan, demikian juga dengan program. Cara yang paling logis untuk merencanakan suatu program adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai.

- b. Adanya kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut,

Dengan program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dalam pelaksanaan program diperlukan kebijaksanaan untuk dapat mencapai tujuan dengan baik.

- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui,

Untuk menjalankan program diperlukan adanya aturan atau pun prosedur guna memperlancar pelaksanaan program. Aturan ataupun prosedur ini berguna sebagai acuan ataupun petunjuk untuk pelaksanaan program.

- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan,

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap program.

- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan program diperlukan adanya keterlibatan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga program memberikan hasil yaitu meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan program juga harus didukung oleh pelaksana yang meliputi organisasi maupun pengawasan dalam proses pelaksanaan.

Menurut menurut Mulyadi (1997:79), program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strateginya. Sedangkan Herman & Cs (dalam Tayibnapi, 2000:9), program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Program akan menunjang implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

## **2.7 Program Bantuan Operasional Sekolah**

### **2.7.1 Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Untuk memahami tentang implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik, berikut penulis paparkan hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Pengertian Bantuan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Bantuan adalah barang yang dipakai untuk memberikan bantuan (Depdiknas, 2001, hal. 672).

#### **b. Pengertian Operasional**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan operasional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan (Depdiknas, 2001, hal. 800)

#### **c. Pengertian Sekolah**

Secara singkat sekolah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya guru dan murid karena suatu kepentingan.

Dalam Petunjuk Teknis Program BOS 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara

teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah, 2013:9).

### 2.7.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
- 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

### 2.7.3 Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki ijin operasional. Khusus untuk lembaga PPS, santri yang menjadi sasaran penerima BOS berusia maksimal 25 tahun.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- MI/PPS Ula di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
- MI/PPS Ula di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
- MTs/PPS Wustha di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
- MTs/PPS Wustha di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

#### 2.7.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2013 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
12. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

14. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
15. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
19. Surat Edaran Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2007 Tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM).
22. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/Pj/2009 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan perubahan terakhir PP Nomor 64 Tahun 2010.
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Pengerjaannya.
26. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 20 Tahun 2000
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2005.

#### 2.7.5 Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Syarat penyaluran dana BOS untuk madrasah dan PPS adalah:

- a) Bagi madrasah/PPS yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama madrasah/PPS (tidak boleh atas nama pribadi).
- b) Madrasah/PPS mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Format BOS-04).
- c) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening madrasah/PPS dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Format BOS-05A), disertakan pula daftar madrasah/PPS yang menolak BOS (Format BOS-05B).

Mekanisme penyaluran dana BOS.

- a) Penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Desember 2013 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.
  - b. Dana BOS diharapkan dapat disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari 2013.
  - c. Khusus penyaluran dana BOS periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap madrasah/PPS pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan pada data periode April Juni. Selanjutnya apabila jumlah dana yang disalurkan tersebut lebih sedikit dari yang seharusnya, maka kekurangan dana BOS pada periode Juli-September tersebut dapat ditambahkan pada penyaluran periode Oktober-Desember, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh madrasah/PPS.
- b) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  1. Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang disertakan lampiran nomor rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS;
  2. Unit terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
  3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi;

4. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara;
5. KPPN mencairkan dana BOS langsung ke rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS;
6. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan madrasah/PPS harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut;
7. Jika dana BOS yang diterima oleh madrasah/PPS lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka madrasah/PPS harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke Kas Negara;
8. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke madrasah/PPS lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak madrasah/PPS lama.

#### Mekanisme Pengambilan Dana BOS pada Madrasah Swasta/PPS:

- a) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Madrasah/PPS (atau bendahara BOS madrasah/PPS) dengan diketahui oleh Ketua Komite Madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Format BOS-3) dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun, sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional madrasah/PPS;

- b) Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- c) Penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap (tiga bulanan), bukan berarti harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana BOS tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah/PPS sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) atau RAPBM;
- d) Bilamana terdapat sisa dana di madrasah/PPS pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas madrasah/PPS (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan madrasah/PPS;
- e) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening madrasah/PPS menjadi milik madrasah/PPS untuk digunakan bagi kepentingan madrasah

## **2.8 Tinjauan Peneliti Terdahulu**

Nama : Fitriana Widyasari  
Tahun : 2006  
Judul : Efektifitas Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Siswa (BOS) pada SDN Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Widyasari adalah untuk mengetahui Efektifitas Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Operasional Siswa (BOS) pada pada SDN Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember belum

berjalan dengan efektif, pemahaman masyarakat mengenai program BOS masih sangat kurang, karena faktor pendidikan yang sangat rendah. Sedangkan fasilitas penunjang BOS masih sangat kurang, namun program BOS membawa dampak positif karena benar benar membantu siswa yang tidak mampu. Sedangkan indikator keberhasilan program BOS belum tercapai, sehingga dari hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan implementasi kebijakan program BOS di SDN Sumberpinang belum berjalan dengan efektif. Penelitian sebelumnya pada nantinya dapat dijadikan sebagai bahan kajian perbandingan bagi studi tentang implementasi program BOS.

Dengan melihat pola hasil penelitian terdahulu, peneliti berharap dapat memperoleh masukan dalam mendeskripsikan efektifitas implementasi program BOS di MTs Darussalam sesuai dengan hasil penelitian di lapangan.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Hal yang terpenting dalam penelitian ilmiah adalah adanya metode penelitian. Karena metode penelitian digunakan untuk dasar panduan mendapatkan data yang lengkap, akurat dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebenaran dalam penelitian dapat dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian.

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Terdapat beberapa teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini. Namun, sebelum lebih lanjut diuraikan mengenai teknik tersebut, ada baiknya terlebih dahulu diuraikan tentang:

1. Jenis penelitian;
2. Fokus penelitian;
3. Lokasi penelitian;
4. Penentuan informan;
5. Teknik pengumpulan data;
6. Teknik pemeriksaan keabsahan data;
7. Metode analisa data;

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis evaluasi untuk mengukur efektifitas implementasi program yang dilaksanakan. Jenis penelitian evaluasi yang akan digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Analisis) yaitu meneliti pelaksanaan program BOS, mulai dari kondisi awal sebelum adanya program BOS, masukan (input), aktifitas (process) program BOS, keluaran (output) sampai manfaat (outcome) yang dirasakan.

Arali dalam <http://Pentingnya Logical framework –Kerangka Kerja Logis – Dalam Penyelenggaraan Program Opini dari Fakta Empiris.html> (yang diakses pada 03 April 2013) menyebutkan bahwa

*“Logframe adalah suatu pendekatan perencanaan program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas...kerangka ini yang akan dipakai dalam pengorganisasian program bahkan tahap-tahap berikutnya dalam manajemen program yaitu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program ... Logical Framework sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk Perencanaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.”*

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu (Iskandar, 2008:17). Sehingga dalam penelitian ini diperlukan kemampuan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya namun tetap dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2009:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Jane Richie (dalam Moleong, 2009:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektif-perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dari definisi-defini beberapa ahli tentang penelitian kualitatif, Moleong (2009:6) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2009:4).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang telah ditentukan, karena kompetensi yang mereka miliki sesuai dengan obyek penelitian yang akan dianalisis. Dalam kaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu efektivitas program BOS, maka penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan program BOS yang telah dilaksanakan di MTs Darussalam Jember serta untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang timbul dalam penerapannya.

Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program BOS, efektif atau tidaknya program tersebut, faktor pendukung dan faktor penghambat, partisipasi seluruh komponen madrasah serta perbandingan hasil evaluasi dari madrasah penerima BOS yaitu MTs Darussalam Jember

Data kuantitatif yang berbentuk tabel-tabel dan berupa angka angka yang dikumpulkan akan ditampilkan dengan dilakukan analisis dan pembahasan secara detail, digunakan untuk mendukung analisis secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi fenomena-fenomena yang sedang diteliti, yang dalam hal ini tentang Efektifitas Implementasi Program BOS dengan sasaran utama adalah MTs Darussalam Jember selaku penerima bantuan dana, baik sebelum kegiatan selama melakukan kegiatan operasional dan sudah mendapatkan bantuan dana bantuan BOS.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) serta hambatan hambatan

yang terjadi dalam implementasinya di MTs Darussalam Jember pada tahun pelaksanaan program 2013.

Adapun Pembatasan dan ruang lingkup penelitian ini meliputi :

#### 1. Definisi Konsep

Efektifitas menurut Schemerhon (dalam artikel <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21347/4/Chapter%20II.pdf> yang diakses tanggal 06 Februari 2013), efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan caramembandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan outputrealisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA)  $\geq$  (OS) disebut efektif.

Tuckman (dalam Julia, 2010:19) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan efisisensi terhadap pelaksanaan suatu program.

#### 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran variabel penelitian berdasarkan kenyataan empiris yang terdapat di lapangan. Menurut Singarimbun dan Efendi, bahwa : “Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel.”

Berdasarkan pendapat di atas dan sesuai dengan permasalahan perlu ditegaskan bahwa variabel dalam penelitian ini adalah efektifitas

implementasi program BOS. Sehingga analisis evaluasi diperlukan untuk mengukur efektifitas implementasi program yang dilaksanakan.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs DarussalamJember untuk mengetahui sejauhmana efektifitas implementasi program di madrasah tersebut yang diukur dengan indikator :

- a) Masukan (input) program BOS
  - 1). Sarana prasarana
    - a) Sarana prasarana belajar
    - b) Perlengkapan program
  - 2). Penerimaan siswa baru
    - a) Kualitas siswa
  - 3). Peraturan terkait
    - a) Juklak/Juknis
    - b) Peraturan perundang undangan
    - c) Perda Kabupaten
  - 4). Harapan para pihak terkait
    - a) SDM pelaksana
    - b) Tim BOS
    - c) Orang tua siswa
    - d) Pemerhati pendidikan
- b) Proses program BOS
  - a) Pemahaman terhadap Petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan kesesuaiannya dengan pelaksanaan
  - b) Pemahaman terhadap Petunjuk teknis (Juknis) kesesuaiannya dengan pelaksanaan
- c) Keluaran (outcome) Program BOS
  - 1) Mutu pendidikan
    - a) Prestasi akademis dan non akademis siswa

- b) Keringanan biaya operasional sekolah bagi orang tua siswa
  - a) Pengurangan / pembebasan terhadap iuran / pungutan sekolah
  - b) Peningkatan dana
  - c) Partisipasi orang tua siswa dan masyarakat terhadap program BOS

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil satu lokasi yakni di MTs DarussalamJember . Penetapan lokasi di MTs DarussalamJember menjadi pilihan tepat karena posisi madrasah tersebut sangat membantu untuk diadakannya penelitian.

Selain itu, peneliti sebagai staf pengajar di madrasah tersebut dapat sangat membantu untuk secara langsung mengetahui proses implementasi BOS di sekolah tersebut. Keakuratan dan ketepatan serta banyaknya jumlah informasi yang akan diperoleh juga akan menjadikan penelitian lebih efektif dan efisien tanpa melemahkan dan mempengaruhi keobjektifan hasil penelitian nantinya.

Adapun Profil Madrasah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **Profil MTs Darussalam:**

Identitas Madrasah

<b>Nomor Induk Siswa Nasional</b>	<b>:</b>	<b>212350973030</b>
<b>Nomor Pokok Sekolah Nasional</b>	<b>:</b>	<b>20524331</b>
<b>Nama Madrasah</b>	<b>:</b>	<b>MTs Darussalam</b>
<b>Kepala Sekolah</b>	<b>:</b>	<b>Endarto Jaswadi, S.Ag</b>
<b>Nomor Telepon</b>	<b>:</b>	<b>0331 – 481074</b>
<b>Alamat</b>	<b>:</b>	<b>Jl. Mawar 47</b>
<b>Kelurahan</b>	<b>:</b>	<b>Jember Lor</b>
<b>Kode Pos</b>	<b>:</b>	<b>68118</b>

<b>Kecamatan</b>	<b>: Patrang</b>
<b>Kabupaten</b>	<b>: Jember</b>
<b>Provinsi</b>	<b>: Jawa Timur</b>
<b>Tahun Berdiri</b>	<b>: 1984</b>
<b>Status Madrasah</b>	<b>: Swasta</b>
<b>Status Akreditasi</b>	<b>: B</b>
<b>Tahun Akreditasi</b>	<b>: 2011</b>
<b>Waktu Belajar</b>	<b>: (Jam 07.00 – 13.20 WIB)</b>

### **3.4 Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian kualitatif ini sangat penting, peranan informan merupakan “bank data” yang dapat memberikan informasi primer yang dibutuhkan oleh peneliti. Melihat posisi dan peranan informan sangat sentral, maka untuk menetapkan informan dibutuhkan seleksi yang tepat. Dalam penelitian ini, penentuan informan disesuaikan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta merujuk pada kompetensi yang mereka miliki untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dikaji. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui, menjalankan dan menerima manfaat dari program BOS di MTs Darussalam Jember. Di samping itu pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjaring (Bogdan dan Biklen, dalam Moleong, 2009:132).

Informan (Moleong, 2009:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya informan tersebut dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Persyaratan dalam memilih dan menentukan informan (Moleong, 2009:132) yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2009:53), dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Sugiyono (2009:53-54), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Snowball sampling (Sugiyono, 2009:54) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Berdasarkan konsep di atas, maka peneliti menggunakan kedua sampling tersebut yakni purposive dan snowball sampling untuk penelitian ini. Informan pertama atau informan kunci dipilih dengan cara purposive sampling, kemudian informan kedua dan seterusnya dipilih dengan cara snowball sampling. Adapun *Key informan* dalam wawancara nantinya yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program BOS :

1. Kepala sekolah dan Bendahara MTs DarussalamJember untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat mengenai penggunaan dana BOS di sekolah, dan sejauhmana dana BOS mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah tersebut;
2. Ketua Komite Sekolah untuk melakukan verifikasi dan pembuktian informasi/data dilakukan dan apa saja harapan mereka tentang program BOS lebih lanjut;

3. Wali murid untuk melakukan verifikasi dan pembuktian informasi/data dilakukan dan apa saja harapan mereka tentang program BOS lebih lanjut;
4. Ketua dan Bendahara Tim BOS Departemen Agama Kab. Jember untuk mendapatkan informasi dan data tentang pelaksanaan program BOS di Madrasah se Kabupaten Jember
5. Pemerhati pendidikan, mereka yang merupakan pribadi yang *concern* terhadap dunia pendidikan, sekiranya dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program BOS di madrasah tersebut, menggali perspektif mereka tentang permasalahan program BOS di madrasah tersebut..

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan dalam hal ini ditekankan pada dua aspek yakni kegiatan wawancara dan observasi. Terkait dengan hal tersebut, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatoris, studi dokumen, dan studi kepustakaan.

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini nantinya, agar diperoleh hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer penulis dapatkan secara langsung dari obyek penelitian atau obyek penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti atau lembaga penelitian. Data yang diperoleh berbentuk hasil (transkrip) wawancara dengan responden terkait, catatan-catatan yang mendukung penelitian, observasi partisipatoris dan sebagainya.

#### **2. Data Sekunder**

Untuk data sekunder, penulis tidak mendapatkan langsung dari obyek penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang program BOS (petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis), peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian agar terarah dan sistematis.

Adapun maksud dari wawancara dan observasi partisipatoris adalah :

### 3.5.1 Observasi partisipatoris

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi partisipatoris terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. pengumpulan data juga dilakukan dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan implementasi kebijakan Program BOS. Disamping dilakukan pengamatan, informasi maupun data yang mendalam tentang faktor-faktor pendukung, factor penghambat, efektifitas implementasi Program BOS di lembaga tersebut.

Observasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian melakukan pencatatan. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2009:174) sebagai berikut ini.

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran.

- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung dipelajari dari data.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, sehingga jalan yang terbaik untuk mengecek data kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data dalam penelitian ini dengan cara observasi partisipatoris, artinya peneliti berusaha menangkap masalah dari dalam, sebab peneliti langsung terjun masuk sebagai pengajar di MTs Darussalam Jember.

Dalam kasus kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Dalam kasus ini misalnya peneliti melihat secara langsung kondisi implementasi program BOS di madrasah tersebut, apakah sudah efektif atau belum.

### 3.5.2 Wawancara Mendalam (in depth interview)

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanyadan mendengar langsung jawaban dari sumber data (orang yang diwawancarai). Wawancara dilakukan secara: *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), serta

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada aktor-aktor/informan kunci yang terlibat dalam program BOS di madrasah tersebut. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan program BOS. Mengingat lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara purposive (dipilih secara sengaja), dengan memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti tentang karakteristik dari obyek yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggabungkan dua model wawancara yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam teknik pengumpulan data ini, juga dilengkapi dengan teknik audio yaitu perekaman suara.

Dalam kegiatan wawancara mendalam (*in depth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati. Walaupun wawancara akan dilakukan secara mendalam namun wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur.

Wawancara (Moleong, 2009:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan mengadakan wawancara (Lincoln dan Guba, dalam Moleong, 2009:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Terdapat beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam hal ini, proses wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar masalah yang akan ditanyakan. Sehingga informan memiliki keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tanpa merasa dibawah tekanan dan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara bebas.

### 3.5.3 Studi Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari lembaga tersebut yang telah melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah penerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

### 3.5.4 Studi Kepustakaan

Perolehan referensi dengan memberikan perbandingan perbandingan teoritik dan penilaian standar yang akan dilakukan dapat dilaksanakan hanya dengan studi pustaka.

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur-

literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami bacaan-bacaan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Bahan bacaan yang digunakan dapat berasal dari buku-buku maupun bentuk kepustakaan lainnya.

### 3.6 Teknik Validasi Data

Menurut Moleong (2009:320), yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. *mendemonstrasikan nilai yang benar;*
2. *menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan;*
3. *memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.”*

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan supaya data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan (validitas) sehingga dengan realita yang ada untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan adanya pemeriksaan data. Menurut Moleong (2009:327) di dalam tabel disebutkan bahwa kriteria pemeriksaan keabsahan data meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, ketergantungan, dan kepastian.

Peneliti menggunakan berbagai cara dalam proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam menganalisa masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data tersebut berguna untuk membandingkan antara data yang didapat serta untuk menutupi kekurangan antara teknik pengumpulan data yang satu dengan data yang diharapkan oleh peneliti.

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin keabsahan (validitasnya). Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari pengolahan data yang sudah diperoleh. Salah satu kriteria teknik menurut Moeloeng, dalam mengukur tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih teknik triangulasi data sebagai teknik untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan

berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.

Triangulasi (Moleong, 2009:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Moleong, 2009:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Data triangulation (Sumber), dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama.
2. Investigator triangulation (Penyidik), yaitu pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti.
3. Methodological triangulation (Metode), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
4. *Theoretical triangulation* (Teori), yaitu peneliti melakukan penelitian tentang topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan perspektif.

Dari beberapa teknik triangulasi diatas, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (*data triangulation*). Dalam hal ini, pengecekan dilakukan pada sumber-sumber yang dianggap kunci/utama oleh peneliti. Dengan demikian, berarti data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2009:330). Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- “1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.”

### **3.7 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide itu. Menurut Hamidi analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara “mengangsur atau menabung” informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi (dalam Susanto, 2006: 142)

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dapat dimulai ketika wawancara melalui analisis jawaban. Jawaban dari nara sumber jika memang dirasa kurang dan masih jauh dari yang diharapkan, maka pertanyaan wawancara akan terus dilakukan sampai berhenti pada tahap tertentu yang dirasa cukup.

Di dalam model analisis interaktif terdapat empat aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh peneliti, yaitu pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Adapun pengertian dari masing masing langkah dalam analisis adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk menjadi temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Display/ penyajian data

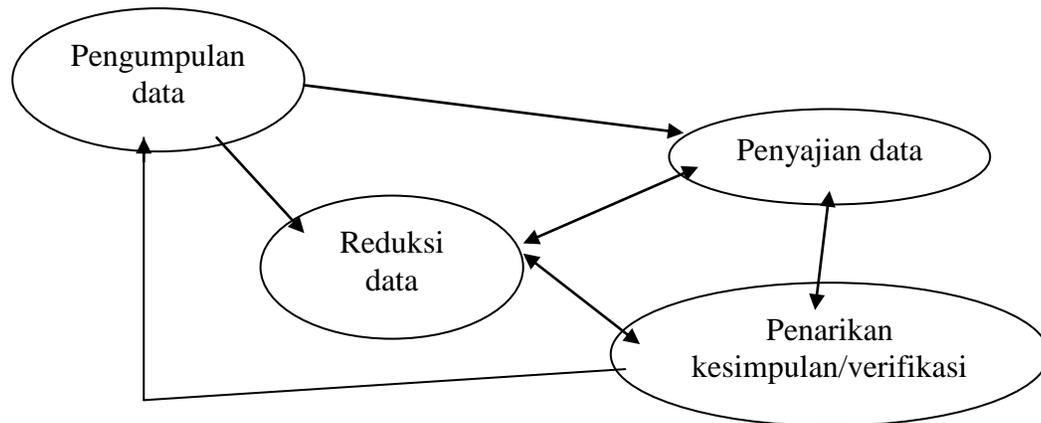
Penyajian data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Penyajian data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Miles dan Huberman menggambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.7.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber:Sugiyono (2009:91)

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui proses reduksi data, yaitu mengkategorikan dan mengelompokkan data yang lebih penting dari hasil wawancara, studi pustaka maupun dokumen. Dari lokasi penelitian, data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting, lalu dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara bertahap dengan cara menyusun ringkasan data menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang diperoleh di cross check melalui komentar informan yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara lanjutan. Misalnya keterangan yang diterima dari kepala sekolah akan dibandingkan dengan keterangan yang didapat dari orangtua siswa. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar diberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian data, yaitu penyajian data setelah direduksi agar mudah dipahami baik dalam bentuk gambar maupun tabel. Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi dari responden menjadi pernyataan. Penyajian data juga dimaksudkan untuk lebih mempermudah bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau data-data tertentu dari penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori sejenis, misalnya data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan program BOS, dan ruang lingkungannya sesuai dengan yang dibutuhkan, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi.
3. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang disajikan disesuaikan dengan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum.

## **BAB 4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Profil Kecamatan Patrang**

Letak lokasi penelitian berada dalam wilayah Kelurahan Jember Lor. Berada dalam wilayah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kecamatan Patrang memiliki luas wilayah 36,99 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 8 Kelurahan, Kondisi dan peruntukan wilayah Kecamatan Patrang sebagian besar merupakan kawasan pemukiman, pendidikan dan perdagangan, hal ini dapat dilihat kondisi dimana sarana pendidikan memiliki porsi yang cukup besar baik jenjang SD sederajat maupun SMP sederajat. Selain fasilitas pendidikan berupa sekolah, jumlah pusat pertokoan dan perdagangan semisal kios, toko waralaba lumayan banyak (selain pemukiman penduduk). Kecamatan Patrang berbatasan dengan wilayah wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Arjasa
- Sebelah barat : Kecamatan Sukorambi
- Sebelah timur : Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Sumbersari
- Sebelah selatan : Kecamatan Kaliwates

Secara demografis, jumlah penduduk Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebanyak 94.470 jiwa, yang terdiri dari atas 46.676 jiwa laki laki dan 47.794 jiwa perempuan, dan dari jumlah tersebut terdapat 24.970 Kepala Rumah Tangga. Struktur mata pencaharian di kecamatan ini yang menonjol adalah karyawan swasta (3.098 orang), pedagang (4.776 orang), buruh (13.752 orang) dan bekerja di bidang pemerintahan (1.908 orang).

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun suatu bangsa, tanpa didukung oleh suatu sistem pendidikan yang baik, akan sulit bagi suatu bangsa untuk berkembang dan sejajar dengan bangsa bangsa maju lainnya. Namun, sungguh ironis, di Indonesia pembangunan di bidang pendidikan masih kurang diperhatikan. Dari segi pendidikan, secara umum Kecamatan Patrang Kabupaten Jember masih mengalami beberapa masalah. Hal ini terlihat dari indikator yang masih

menunjukkan rendahnya pendidikan di Kecamatan Patrang. Indikator tersebut antara lain : (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih tergolong rendah, (2) tingkat pendidikan penduduk dimana mayoritas jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan hanya sampai pada jenjang pendidikan dasar, hal tersebut membawa Kecamatan Patrang sebagai Kecamatan dengan pendidikan yang cukup rendah, padahal Kecamatan Patrang adalah kecamatan yang lokasinya sangat berdekatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk ini sedikit banyak telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Patrang. Rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi / memperkecil peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa datang.

Untuk infrastruktur pendidikan, terdapat 45 Taman Kanak-kanak, 19 Sekolah Dasar, 13 Sekolah Menengah Pertama dan 3 Sekolah Menengah Atas, 7 Perguruan Tinggi dan Akademia. Selain itu infrastruktur pendidikan lain yang setara dengan sekolah umum adalah 11 Roudhotul Athfal, 9 Madrasah Tsanawiyah dan 3 Madrasah Aliyah.

## **4.2 Profil Sekolah**

### **4.2.1 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darussalam Jember**

MTs Darussalam Jember merupakan satu satunya MTs di Kecamatan Patrang yang berpredikat akreditasi B. Berlokasi di Jalan Mawar nomor 47, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Sekolah ini memiliki visi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan berakhlaqul karimah dalam kepribadian. Sedangkan misi dari sekolah ini adalah: (1) mengembangkan sistem pembelajaran konseptual dan adaptif (2) mengembangkan kurikulum sebagai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan yang kompetitif (3) mengembangkan ekstrakurikuler sebagai aktualisasi potensi kepribadian siswa (4) mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai nilai (5) menyediakan tenaga pendidik dan karyawan yang professional (6) mewujudkan

program sertifikasi dan kualifikasi (7) mengembangkan kepribadian, ketrampilan dan jiwa sosial (8) mengembangkan kepemimpinan yang revolusioner (9) mengembangkan sistem penilaian yang berbasis prestasi. Ruang kelas di sekolah ini terdapat 3 kelas yang dilengkapi dengan speaker pada tiap kelas, juga 1 ruangan guru, 1 ruangan kepala sekolah, 1 ruangan perpustakaan dan 1 ruangan TU dan karyawan. Dimana terdapat meja dan bangku yang bersih dan lengkap disertai pendingin ruangan yakni kipas angin. Fasilitas lainnya adalah tersedianya ruang bagi siswa untuk praktikum berupa Laboratorium Komputer dan IPA dimana tersedia sebanyak 15 Unit Komputer untuk praktikum TIK dan alat alat peraga untuk bereksperimen dalam bidang studi IPA. Jumlah siswa untuk saat ini adalah 80 siswa dengan keseluruhan 3 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dengan tingkat kesejahteraan siswa untuk golongan menengah kebawah 82 % dan menengah ke atas 18 %.

### **Prestasi Lulusan**

- a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 9,00 dan 100 % lulus.
- b. Prestasi lomba lomba akademik dan non akademik antar sekolah

### **Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan**

- a. Guru 50 % berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 33 % berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan tetapi telah mengikuti penataran yang diajarkan dan sisanya 17 % berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta kesemua guru dapat mengoperasikan komputer;
- b. Guru 42 % sertifikasi dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
- c. Tenaga Kependidikan

- ✓ Tenaga TU belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan karena Jumlah pegawai TU yang tidak memenuhi standar tersebut.
- ✓ Kepala TU, berpendidikan S1 sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan mampu mengoperasikan komputer;
- ✓ Tenaga administrasi keuangan dan akuntan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan karena tanggung jawab yang dimaksud masih dirangkap oleh beberapa guru bidang studi;
- ✓ Tenaga sarana prasarana berpendidikan S1 namun belum berpengalaman dalam mengembangkan sarana prasarana sehingga hanya memperoleh hasil akreditasi B;
- ✓ Pustakawan, Laboran dan Teknisi Komputer belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan karena beberapa guru bidang studi masih merangkap jabatan tersebut.

Jumlah Guru terbatas disebabkan oleh sedikitnya jumlah peserta didik dan lokal KBM yang terbatas pula, yakni hanya 12 orang guru bidang studi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan yang terbatas disebabkan oleh terbatasnya lokal ruang dan minimnya dana yang dimiliki oleh sekolah, sehingga sekolah tidak bisa mengangkat tenaga kependidikan baru sesuai bidangnya.

### **Pengembangan Kurikulum**

Kurikulum di MTs Darussalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Berbasis Karakter atau Kurikulum Berkarakter Bangsa (KBB).

- a. 100 % guru telah menyusun program tahunan, program semester, kalender pendidikan, RPP dan Silabus pembelajaran pada bidang studi masing masing;
- b. Program Remedial dan Pengayaan belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan Remedial 100 % guru sedangkan program pengayaan hanya terbatas pada guru bidang studi yang di UNAS kan.

### **Sarana Prasarana**

- a. Sarana dan Prasarana belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahan dan Sumber Belajar
  - ✓ Terdapat beragam macam buku acuan dan buku ilmu pengetahuan baik yang tersedia di perpustakaan maupun ruang guru, dan kesemuanya dalam kondisi baik;
  - ✓ Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum sebanding dan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan di berbagai mata pelajaran.
- c. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional yaitu whiteboard sampai yang modern semisal LCD viewer, Laptop dan Komputer;
- d. Lingkungan sekolah aman dan tertib serta memiliki media informasi elektronik (website) yang dapat diakses setiap saat.

### **Pengembangan Proses Belajar Mengajar**

- a. Proses pembelajaran belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
- b. Belum sepenuhnya mampu mengembangkan inovasi pembelajaran secara maksimal

### **Pengembangan Pembiayaan**

- a. Pembiayaan per siswa pertahun Rp. 240.000 dengan dibantu mayoritas sumber dana dari BOS.
- b. Memiliki usaha sekolah yang mempengaruhi pada keuntungan ekonomi untuk membantu penyelenggaraan sekolah semisal koperasi sekolah.
- c. Menjalani kerjasama dengan alumni untuk penggalangan dana.

### **Pengembangan Penilaian**

- a. Memiliki standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Sistem penilaian tersusun dengan baik, mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester sampai penilaian akhir semester;
- c. Telah memiliki beberapa dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi, namun belum semuanya.

### **4.3 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus, program BOS bertujuan untuk : (1) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta, (2) menggratiskan seluruh siswa SD Negeri sederajat dan Siswa SLTP sederajat terhadap biaya operasional sekolah, (3) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

#### **4.3.1 Sasaran Program dan Besar Bantuan**

Sasaran program BOS adalah semua MI dan MTs negeri maupun swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustho penyelenggara Wajib Dikdas 9 Tahun di seluruh provinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/ PPS termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- ✓ MI / PPS Ula di Kota : Rp. 400.000,- / siswa / tahun
- ✓ MI / PPS Ula di Kabupaten : Rp. 397.000,- / siswa / tahun
- ✓ MTs / PPS Wustho di Kota : Rp. 575.000,- / siswa / tahun
- ✓ MTs / PPS Wustho di Kabupaten : Rp. 570.000,- / siswa / tahun

#### 4.3.2 Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2013, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari 2013 sampai Desember 2013 yaitu semester 2 tahun pelajaran 2013/2013 dan semester 1 tahun pelajaran 2013/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan yaitu Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, dan Oktober – Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan. Untuk menyamakan persepsi tentang pendanaan pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi, dan masyarakat serta program BOS itu sendiri, akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

#### 4.3.3 Jenis biaya pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam PP nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini, akan diuraikan jenis jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan / atau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

1. Biaya satuan pendidikan adalah Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
  - a. Biaya Investasi adalah Biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
  - b. Biaya Operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

- c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  - d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara / satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
  3. Biaya Pribadi Peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### 4.3.4 Madrasah Penerima BOS

Adapun sekolah yang menerima manfaat program BOS adalah : (1) Semua MI/ MTs negeri wajib menerima dana BOS Madrasah Penerima BOS, dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. (2) Semua madrasah swasta yang telah memiliki izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS. (3) Bagi madrasah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut. (4) Seluruh madrasah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (5) Madrasah negeri kategori RMBI dan MBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite madrasah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pemungutan yang dilakukan oleh madrasah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. (6) Madrasah Negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem Madrasah Bertaraf RMBI atau MBI

tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah serta menggratiskan siswa miskin.

#### 4.3.5 Program BOS dan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu

Dalam rangka penuntasan Wajar 9 Tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola; serta akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran / pungutan yang dilakukan oleh madrasah / PPS.
3. Anak lulusan sekolah setingkat MI, harus di upayakan kelangsungan pendidikannya ke tingkat MTs / setara. Tidak boleh ada tamatan MI / setara tidak dapat melanjutkan ke MTs / setara.
4. Kepala Madrasah / Penanggung Jawab PPS mencari dan mengajak siswa MI yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di MTs / PPS wustho. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada Madrasah atau PPS.

#### 4.3.6 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah di atur dalam PP. No 48 tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah / pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. (2) Madrasah yang diselenggarakan pemerintah / pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan / atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan juga dapat bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan / atau sumber lain yang sah. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### 4.3.7 Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik

Peserta didik, orang tua, dan / atau wali peserta didik bertanggung jawab atas (1) biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/ uang jajan, buku tulis, dan alat tulis dan lain sebagainya, (2) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan / atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan / atau berbasis keunggulan lokal.

#### 4.3.8 Mekanisme Alokasi

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut : (1) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap madrasah / PPS melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi, (2) Atas dasar data jumlah siswa tiap madrasah / PPS, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi, (3) Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota

melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah / PPS sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap madrasah / PPS, (4) Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota menetapkan madrasah / PPS yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan madrasah dan PPS ditandatangani oleh Kepala Kandepag Kab/ Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri dengan daftar nama madrasah / PPS dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS-02B). Madrasah / PPS yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), (5) Tim Manajemen BOS Kab/ Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar madrasah / PPS kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank / POS Penyalur dana dan madrasah / PPS penerima BOS.

#### 4.3.9 Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/ Dewan Guru dan Komite Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAKM/ RAPBM, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Khusus untuk PPS, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara penanggung jawab program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi PK Pontren (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren) Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh Madrasah / PPS, Madrasah / PPS wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan lain sebagainya yang relevan), (2) Pembelian buku teks pelajaran untuk

dikoleksi di perpustakaan, (3) Pembelian buku referensi, pengayaan, dan panduan guru untuk dikoleksi di perpustakaan, (4) pembiayaan kegiatan remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, PMR, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan akomodasi guru / siswa dalam rangka mengikuti lomba), (5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian madrasah / PPS dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotokopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka menyusun rapor siswa), (6) Pembelian bahan bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris dan sebagainya untuk kebutuhan sehari hari madrasah / PPS, (7) Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar madrasah / PPS, jika tidak terdapat jaringan di sekitar madrasah / PPS dan madrasah / PPS tersebut memerlukan listrik, maka diperkenankan untuk membeli genset, (8) Pembiayaan perawatan madrasah / PPS, (9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan honorarium tugas tambahan Kepala Madrasah non PNS, Wakil Kepala Madrasah, Pembantu Kepala Madrasah, Wali Kelas, Petugas Laboratorium / Perpustakaan, (10) Pengembangan profesi guru, (11) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah / PPS, (12) Pembiayaan pengelolaan BOS, (13) Pembelian Personal Computer (PC) untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk MI / PPS Ula dan 2 set untuk MTs / PPS Wustho, (14) Khusus untuk PPS, dana BOS digunakan untuk biaya asrama/ pondokan dan membeli peralatan ibadah, (15) Bila seluruh komponen 1 s/d 14 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel madrasah / PPS.

#### 4.3.10 Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS dilarang untuk : (1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan, (2) Dipinjamkan kepada pihak lain, (3) Membiayai kegiatan

yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tur (karya wisata) dan sejenisnya, (4) Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid, (5) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat, (6) Membangun gedung/ ruangan bar, (7) Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran, (8) Menanamkan saham, (9) Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/ guru bantu dan kelebihan jam mengajar bagi PNS.

Pada bab ini juga akan diuraikan hasil penelitian efektifitas implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember. Dalam bab ini juga berisi jawaban jawaban atas pertanyaan pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi madrasah yang dimaksud, dengan didukung data primer hasil wawancara dengan informan informan terpilih kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam menilai efektifitas implementasi program BOS di madrasah tersebut kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun.

Dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan mutu, memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata kunci pengertian mutu, yaitu: sesuai standar, sesuai penggunaan pasar/ pelanggan, sesuai perkembangan kebutuhan dan sesuai lingkungan. Adapun yang dimaksud mutu sesuai dengan standar yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun standar yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi, (4) Standar Sarana dan Prasarana, (5) Standart Manajemen, (6) Standar Tenaga Pendidik, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian.

Penilaian sejauhmana tingkat mutu pendidikan dalam penelitian ini menggunakan indikator (1) masukan (input) yaitu SDM, dengan menekankan pada

kualifikasi pendidikan baik yang dimiliki oleh guru maupun pengelola dana BOS, pengalaman di bidangnya, kompetensi, misalnya peran aktif guru dalam pelatihan/ MGMP mata pelajaran yang menjadi bidangnya. Dana BOS yang diterima apakah telah tepat waktu dalam penyalurannya. Seleksi penerimaan siswa baru, setiap madrasah telah menetapkan standar minimal Ujian Nasional maupun tes potensi akademik sebagai salah satu syarat untuk menjaring siswa yang berkualitas. Peraturan yang relevan, dasar hukum yang diterbitkan pemerintah belum ada, tetapi telah diterbitkan surat edaran yang mengatur peruntukan resmi dana BOS. Masukan lainnya yang berupa harapan para pihak, (2) Aktifitas (Process) yang menyangkut kesesuaian antara implementasi program di lapangan dengan juklak/juknis yang menjadi acuan bagi pelaksana, diukur dari penggunaan BOS apakah telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, (3) Keluaran (Output) yaitu prestasi akademis dan non akademis siswa, diukur dari pencapaian nilai UAM maupun UAMBN dan prestasi di bidang ekstrakurikuler, seperti bidang olahraga, seni atau ketrampilan lainnya dan keringanan biaya operasional sekolah. Keringanan biaya operasional sekolah, dimana dapat diukur apakah siswa telah dibebaskan dari SPP, biaya pembelian buku dan sebagainya.

Dalam pemilihan madrasah tersebut sebagai lokasi penelitian, peneliti meneliti lebih awal secara subjektif dan objektif pada MTs DarussalamJember dengan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. MTs Darussalam dikategorikan sebagai sekolah potensial yaitu sekolah yang masih relatif banyak memiliki kekurangan/ kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### **4.4 Hasil Penelitian**

Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum dalam bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas implementasi program BOS di MTs Darussalam Jember di wilayah Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada tahun 2013. Maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan

informan yang terkait seperti Kepala Seksi Mapenda Kemenag Kabupaten Jember, Pemerhati Pendidikan, Kepala Madrasah dengan didampingi Bendahara Madrasah, Orang Tua Siswa, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwasannya implementasi program BOS berjalan cukup efektif. Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan setidaknya dapat menggambarkan bagaimana efektifitas implementasi program BOS dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwasannya dalam melakukan wawancara, peneliti berpijak pada teori evaluasi program Bruce WTuckman.

Sebelum penjelasan terhadap pembahasan hasil penelitian secara mendetail, hasil dari wawancara dengan para informan disajikan untuk memberikan wacana awal terhadap efektifitas implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan di MTs Darussalam, berikut penjabarannya :

#### 4.4.1 Segi Pencapaian Masukan / Input

##### 4.4.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola BOS

Walaupun tidak ada persyaratan khusus berkaitan dengan petugas yang menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana BOS beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang pendidikan serta pengalaman perlu diperhatikan. Petikan wawancara dengan Bapak Drs. H. Machfudz, M. Pd.I, Kasi Mapenda, mengungkapkan hal tersebut :

*“Selama ini bendahara madrasah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam arti dari latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya, berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di madrasah, karena sejak pertama mengabdikan di madrasah ini telah bergabung dengan Bagian Tata Usaha mengelola administrasi pembiayaan sekolah siswa”* (hasil wawancara 14 Mei 2013)

*“ Untuk SDM yang terpilih mengelola program BOS di Kabupaten Jember merupakan SDM terpilih yang cakap dan mampu, petugas baik dari Kemenag Propinsi maupun Kepala Madrasah cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan yang timbul, misalnya masalah keterlambatan penyaluran, lainnya adalah memberikan sedikit penyuluhan bagaimana menyusun RAPBM sesuai dengan kondisi sekolah agar dana BOS dapat dimanfaatkan dengan efektif. Sejak semula program BOS dilaksanakan, saya selalu tekankan kepada pihak madrasah bahwa dana yang dikelola jumlahnya besar dan secara langsung/ tidak langsung menyangkut proses KBM, jadi untuk SDM yang diberi kepercayaan mengelolanya harus memiliki kemampuan dan pengalaman” (hasil wawancara 14 Mei 2013)*

Sedangkan Ibu Roudhoh selaku pemerhati pendidikan menilainya sebagai berikut:

*“Selama ini yang saya temui di beberapa madrasah di Wilayah Kecamatan Patrang, Kepala dan Bendahara Madrasah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS cukup kompeten, kualifikasi pendidikan berasal dari ilmu ekonomi, sudah sesuai dengan bidangnya. SDM lain seperti Petugas Kememnag Kabupaten Jember maupun dari Seksi Mapenda Kemenag juga profesional dalam bekerja, mereka memahami dengan baik juklak atau juknis program BOS” (hasil wawancara 16 Mei 2013)*

Informasi dan keterangan yang didapat dari Ibu Syafiuddin, Wali Murid MTs Darussalam adalah sebagai berikut:

*“Yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di madrasah ini, karena yang saya ketahui beliau sangat berpengalaman sebagai bendahara madrasah, dari segi pendidikannya juga memadai” (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2013)*

#### 4.4.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program jugatelah cukup memadai, seperti yang dituturkan oleh Bapak Endarto Jaswadi selaku Kepala MTs Darussalam Jember .

*“Untuk kelengkapan program ya kami disini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, ruang pertemuan yang dapat digunakan bagi petugas.”* (hasil wawancara 12 Desember 2013)

#### 4.4.1.3 Peraturan Terkait Program BOS

Mengenai peraturan yang terkait dalam program BOS, pemerintah (Diknas dan Kemenag) belum mengeluarkan peraturan yang sedianya mengatur program BOS secara keseluruhan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang pendanaan pendidikan setidaknya dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS. Berikut ini petikan wawancara dengan Bapak Drs. H. Machfudz, M. Pd.I, Kasi Mapenda Kemenag Kabupaten Jember.

*“Untuk program BOS ini memang dasar hukumnya berpijak dari PP Nomor 48/2009 ya, kalau yang khusus mengatur BOS belum ada. Walaupun sejauh ini pusat dan propinsi mengeluarkan surat edaran dalam rangka menindaklanjuti PP tersebut, edaran tersebut cukup komprehensif dalam mengatur pelaksanaan program.”* (hasil wawancara tanggal 14 Mei 2013)

Ibu Roudhoh, pemerhati pendidikan menilai perlu adanya dasar hukum yang kuat, yang mengatur program BOS secara khusus.

*“Sayang memang, pemerintah hanya mengeluarkan peraturan yang mengatur pembiayaan di bidang pendidikan secara umum, padahal di dalam program BOS, penyaluran dana menyangkut pembiayaan pendidikan jumlahnya sangat besar dan bersifat nasional, seharusnya pemerintah menerbitkan dasar yang lebih kuat lagi yang mengatur implementasi program secara detail.”* (hasil wawancara 16 Mei 2013)

Seperti implementasi program pada umumnya, perlu adanya *feedback* dari penerima manfaat program tersebut, maka peneliti mencoba informasi tentang harapan Kepala Madrasah yang bersangkutan, Bapak Endarto Jaswadi, Kepala MTs

Darussalam berharap program BOS lebih lanjut akan berjalan lebih baik lagi, berikut penuturannya:

*“Saya cukup lama menjadi kepala madrasah di sini, saya merasakan manfaat program BOS ini sangat bagus yah, tapi pelaksanaan lebih lanjut mungkin pemerintah harus mengatur, tidak menutup kemungkinan partisipasi orang tua maupun masyarakat, karena kalau ada BOS tapi madrasah dilarang untuk memungut biaya untuk keperluan tertentu yang berkenaan langsung dengan pembelajaran, madrasah harus mencari jalan keluar bagaimana mencukupi kebutuhan, kalau sekarang ini tidak semua sekolah partisipasi orang tua/ masyarakat itu tinggi.”* (hasil wawancara tanggal 12 Desember 2013)

#### 4.4.2 Segi Pencapaian Proses

##### 4.4.2.1 Keseuaian antara proses implementasi dengan Juklak dan Juknis

Dari pencapaian proses program BOS, selama 4 tahun berjalan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan oleh Kemenag. Untuk penggunaan dana BOS, pihak madrasah mengalokasikannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam juklak. Penuturan Bapak Drs. H. Machfudz, M. Pd.I, Kepala Seksi Mapenda Kemenag Kabupaten Jember berikut menjelaskan bagaimana deskripsi alokasi dana BOS digunakan oleh sekolah

*“Karena saya disini memiliki peran dalam manajemen BOS tingkat Kabupaten, maka saya turut berperan dalam pengawasannya. Berdasarkan laporan yang saya terima dari madrasah madrasah tersebut. Tren yang saya nilai setiap tahunnya seperti ini, untuk periode awal program BOS, madrasah menggunakannya untuk perbaikan sarana dan prasarana madrasah, pada periode ini kami menemukan beberapa unsur penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kecil madrasah, kami tegur madrasah madrasah itu dan mereka memperbaikinya, setelah itu pada pertengahan kami menemukan satu penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, hingga pada periode akhir program ini setelah dimonitor dan dievaluasi, kami melihat madrasah madrasah telah sesuai koridor penggunaan resminya, hanya saja pengadaan teks buku pelajaran, berdasarkan laporan yang diterima, masih terkendala sampai saat ini.”* (hasil wawancara tanggal 14 Mei 2013)

Secara garis besar, berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS, peneliti melihat sekolah menggunakan dana BOS untuk keperluan seperti (1) Pengadaan sarana prasarana sekolah (2) biaya tambahan kegiatan operasional sekolah seperti honorarium guru honorer (3) kegiatan ekstrakurikuler. Seluruh item penggunaan tersebut tidak melanggar ketentuan juklak/juknis program.

#### 4.4.3 Segi Pencapaian Hasil / Output

##### 4.4.3.1 Kemampuan dan Kekreatifan Tenaga Pendidik

Pemanfaatan program BOS yang mengacu pada mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orang tua siswa. Secara umum mutu diartikan sebagai derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dapat dipandang dari segi proses pendidikan dan hasil pendidikan (Kemendikbud, 2013).

Untuk mencapai manfaat hasil pendidikan tersebut, madrasah dituntut mampu mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Untuk menunjang kemampuan dan kekreaitan guru, setiap madrasah mengusahakan pengembangan merata bagi setiap guru mata pelajaran dan membina guru sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan program BOS dalam pengembangan kompetensi guru diusahakan pihak madrasah dengan berbagai macam cara, seperti yang disampaikan oleh Bapak Endarto Jaswadi, Kepala MTs Darussalam

*“untuk pengembangan guru, kami pihak madrasah sedapat mungkin memanfaatkan dana BOS, misalnya mengikutsertakan guru-guru pada MGMP setiap mata pelajaran, memfasilitasi kebutuhan guru, dan diklat diklat yang diadakan oleh lembaga swasta, dalam hal ini selain dari BOS*

*kami juga memanfaatkan BOP.” (hasil wawancara tanggal 12 Desember 2013).*

Kemampuan yang dimiliki guru sangat erat kaitannya dengan metode pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu menerjemahkan kurikulum ke dalam KBM agar transfer ilmu dapat berjalan secara optimal. Kemampuan guru dalam menterjemahkan tergantung dari kompetensi yang dimilikinya.

#### 4.4.3.2 Sarana Prasarana Madrasah

Mengenai sarana prasarana yang mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlihat madrasah sedapat mungkin memanfaatkan untuk perawatan sarana prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana prasarana madrasah lainnya.

Berikut petikan wawancara dengan salah satu orang tua siswa MTs Darussalam, Ibu Syafiuddin, berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana prasarana madrasah

*“sebenarnya BOS bantu orang tua sekali, meringankan biaya, tapi masih banyak kekurangan juga, paling nyata soal buku, saya dapat laporan dari anak saya, satu kelas buku yang dibagi gak cukup jadi bisanya satu buku untuk dua anak, ternyata gak hanya di kelas anak saya, semua kelas seperti itu.” (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2013).*

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan sumatif, ujian nasional). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangibile) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Angka kelulusan di MTs Darussalam relatif baik, terhitung sejak pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%), dan seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMA sederajat. Kemampuan siswa terhitung masih dalam kategori cukup, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang terlalu menonjol.

Mengenai tingkat kelulusan siswa pada MTs Darussalam, pada periode pelaksanaan program BOS, semua siswa lulus dengan rata rata nilai cukup memuaskan.

Tabel 4.4.1 Daftar Nilai UAN MTs Darussalam

Tahun Pelajaran	Rata Rata UAN					Rata Rata
	Bhs. Indo	MTK	Bhs. Inggris	IPA	Jumlah	
2011/2012	7.57	7.76	6.93	7.43	26.69	7.15
2012/2013	8.20	7.47	7.31	7.67	30.65	7.48

Sumber : Data MTs Darussalam Jember tahun 2012 dan 2013

Selain nilai UAN yang relatif baik, madrasah tersebut memiliki prestasi akademik lain, umumnya seperti lomba debat bahasa inggris, dan pidato dua bahasa yakni bahasa arab dan bahasa inggris serta lomba lainnya yang pencapaiannya bervariasi dari tingkat Kecamatan sampai tingkat nasional. Untuk prestasi non akademik siswa, dapat dilihat pada profil madrasah dimana setiap sekolah rata-rata memiliki prestasi di bidang kesenian dan olahraga.

Selain menyangkut mutu pendidikan, masalah dana BOS sendiri patut diamati, apakah dalam penyalurannya telah tepat waktu, prosedur penyaluran, sampai persyaratannya. Hal lain yang sangat penting dalam pencapaian hasil adalah soal keringanan biaya sekolah, apakah dengan adanya program BOS, orang tua siswa masih dibebankan pungutan/iuran lain. Orang tua siswa MTs Darussalam, Ibu Syafiuddin, memberi keterangan sebagai berikut :

*“kalau untuk biaya sekolah terutama SPP, kami memang tidak dipungut, tetapi terkadang untuk biaya tidak terduga pihak madrasah masih memungut*

*dari kami, seperti misalnya biaya remedial siswa, yang tidak tertutup oleh BOS, dan madrasah sangat transparan pada orang tua, mereka meminta persetujuan kami lebih dulu. Satu hal yang pasti, pungutan-pungutan seperti itu sangat jarang sekali dilakukan oleh madrasah.” (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2013).*

#### **4.5 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan BOS**

Berbagai kendala yang ditemui oleh informan dalam program BOS ini adalah sebagai berikut

*“Jumlahnya itu yang kecil, kalau bisa kan sesuai dengan kebutuhan, namanya saja bantuan operasional sekolah jadi kebutuhan sekolah dapat ditutupi oleh BOS, kalau yang sekarang tidak cukup untuk menutupi biaya operasional tersebut”(hasil wawancara tanggal 12 Mei 2013 dengan wali murid siswa MTs Darussalam, Ibu Syaifuddin).*

*“Kalau ditanya hambatan, Semua pihak pasti setuju, masalah sosialisasi yang hampir tidak pernah dilakukan baik oleh pemerintah maupun madrasah, dana yang terlambat cair, jumlahnya yang minim adalah hambatan utama dalam pelaksanaan program ini.” (hasil wawancara tanggal 16 Mei 2013 dengan Pemerhati Pendidikan, Ibu Roudhoh).*

*“Sosialisasi yang minim kepada masyarakat, sekali lagi karena terbentur dana yang terbatas, tahapan lain yang paling kurang memuaskan adalah penanganan pengaduan, penyaluran dana, serta pelaporan dan monitoring evaluasi. Masih ada madrasah yang mengajukan laporan tidak sesuai dengan realisasinya, kesulitan madrasah dalam menyusun laporan keuangannya, dan satu lagi, telatnya pencairan dana.” (hasil wawancara tanggal 14 Mei 2013 dengan Kasi Mapenda, Drs. Machfudz, M.Pd.I).*

*“Ketidakhahaman orang tua sering membuat kami repot, mereka menganggap kalau BOS membuat madrasah membebaskan seluruh biaya, itu adalah dampak dari tidak diadakannya sosialisasi program BOS alias sosialisasi tersebut kurang maksimal, karena jujur kami tidak menganggarkan kegiatan sosialisasi, dana BOS habis untuk operasional sekolah dan kegiatan kesiswaan lainnya, yang kami prioritaskan lebih penting ketimbang sosialisasi”(hasil wawancara tanggal 12 Desember 2013 dengan Kepala Sekolah MTs Darussalam, Endarto Jaswadi, S.Ag).*

Setelah sosialisasi, tahapan lain yang paling kurang memuaskan adalah penanganan pengaduan, penyaluran dana, serta pelaporan dan monitoring evaluasi. Banyak pihak menilai bahwa penanganan pengaduan kurang transparan, dan pihak-pihak non-pemerintah khususnya merasa kesulitan dalam menyalurkan aduan masyarakat yang mereka terima. Selain itu, cukup banyak yang tidak yakin bahwa beberapa pengaduan sudah ditindaklanjuti secara memadai. Masalah penyaluran dana yang paling banyak disoroti adalah keterlambatan penerimaan dana di rekening madrasah. Keterlambatan ini menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif, dan bahkan mendorong madrasah untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan realisasinya, sebagaimana dijelaskan di subbab mengenai pemanfaatan dana dan pelaporan dari madrasah. Sedangkan dalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang paling banyak dikemukakan adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan dan banyaknya lembaga yang ikut melakukan monitoring evaluasi, serta pemanfaatan kegiatan monitoring evaluasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

#### **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi program BOS di MTs Darussalam Jember, menggunakan teori evaluasi program yang diungkapkan oleh Bruce W. Tuckman yang membagi analisa dengan menggunakan metode terkait masukan (input) program, proses program sampai hasil (output) yang dicapai oleh program itu sendiri.

##### **4.6.1 Pencapaian Masukan (Input)**

Masukan program BOS dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS, sarana prasarana penunjang pelaksanaan program, peraturan-peraturan terkait program BOS, dan harapan para pihak, baik pelaksana maupun penerima manfaat program BOS.

#### 4.6.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam proses pelaksanaan program BOS faktor lain yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Tanpa sumber-sumber daya tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik dalam jumlah maupun terlebih-lebih kualifikasinya, sebagai bekal untuk menterjemahkan kerangka dasar kebijakan ke dalam praktis layanan publik.

Gambar 4.6.1 Struktur Tim Manajemen BOS tingkat Madrasah Tahun 2013

<b><u>Tim Pelaksana Kegiatan</u></b>	
Kepala MTs Darussalam/ Ketua Tim	: Endarto Jaswadi, S.Ag
Bendahara Tim BOS	: Ahmad Junaidi, S.Pd
Komite Madrasah	: Sudarman

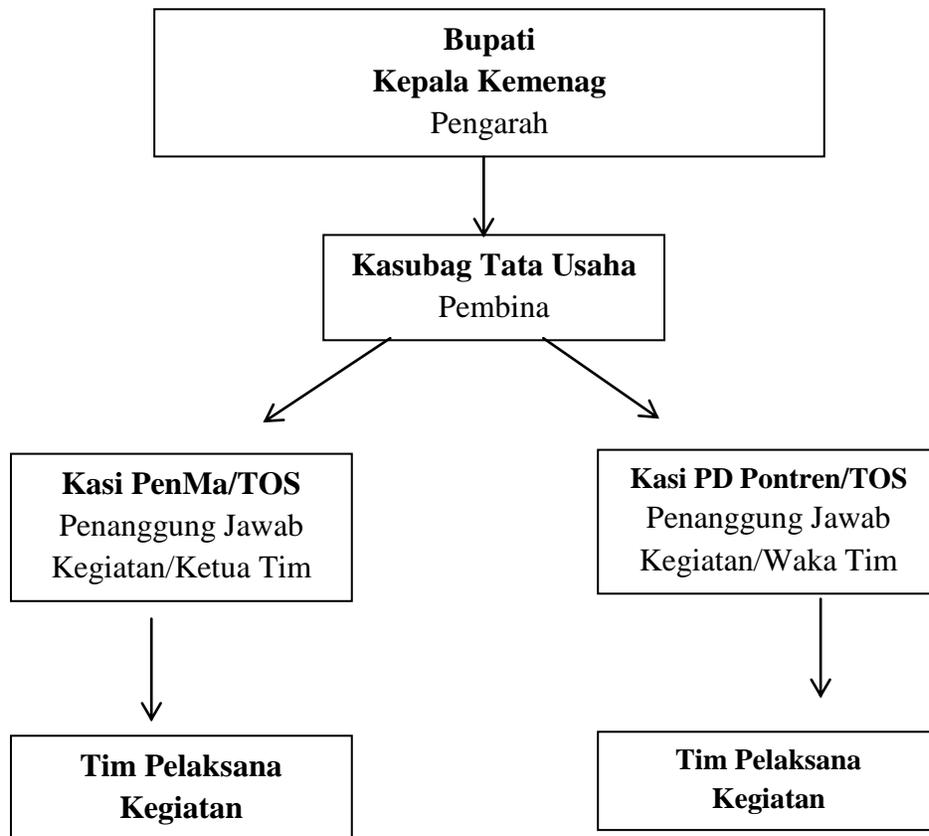
Sumber : Laporan Penggunaan Dana BOS MTs Darussalam 2013

Komitmen SDM dalam mengelola program yang ditandai dengan; dedikasi yang tinggi, sifat pro-aktif, antusiasme dan kemampuannya dalam proses kerja, merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses program. Sulit dibayangkan bagaimana pelaksana program BOS dapat menyiasati strategi untuk mencapai tujuan ketika mereka dihadapkan pada kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan program BOS, misalnya pluralitas sasaran kebijakan, kondisi sosial-budaya tertentu, dan kondisi dimana diperlukan penggunaan teknologi tertentu.

Mudah dimengerti bahwa dalam proses implementasi diperlukan adanya; (1) kesungguhan top leader, misalnya ketua komite atau tataran otoritas yang lebih tinggi, (2) dukungan moral dan finansial atau sumber-sumber lain yang diperlukan, (3) komitmen dan kecakapan SDM. Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang terlibat di dalamnya.

Profesionalisme dan kualitas cukup baik, mereka dapat memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak atau juknis sebagai dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah awal, pengelolaan dana sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Pengalaman mereka didukung oleh pendidikan yang memadai, seluruhnya berpendidikan sarjana, dan sebagian besar latar belakang pendidikan telah sesuai dengan bidang yang mereka tekuni yaitu manajemen keuangan.

Gambar 4.6.2 Struktur Tim Manajemen BOS Kabupaten/ Kota Tahun 2013



Sumber : Tim BOS Kemenag 2013

Di MTs Darussalam, Sumber daya manusia yang mengelola sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan Kemenag Kabupaten/Kota. Kemampuan Kepala

Madrasah selaku Ketua Tim BOS MTs Darussalam sudah cukup professional berdasarkan pengalaman tahunan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki bendahara Tim BOS juga memenuhi kualifikasi sesuai arahan. Kemampuan Tim dalam mengelola dan mengatur dana BOS dibuktikan dengan terselenggaranya pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Profesionalisme Kepala Madrasah tersebut secara nyata dapat membawa dan mempengaruhi tenaga pendidik lainnya untuk aktif dalam meningkatkan kemampuan penyaluran ilmu kepada peserta didik. Dengan pengelolaan dana BOS yang difungsikan untuk membiayai tenaga pendidik mengikuti pelatihan pelatihan MGMP nyatanya dapat membawa kemajuan semangat siswa dalam proses belajar mengajar.

#### 4.6.1.2 Dana

Banyaknya permasalahan yang terjadi seputar pelaksanaan program BOS ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program BOS ada masalah. Masalahnya adalah dana BOS tidak datang pada saat dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan madrasah, yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan anak didik, tidak dapat ditunda. Ada dua faktor penyebab sehingga terjadi hal itu. Pertama, ada perbedaan antara tahun anggaran dengan tahun pelajaran. Tahun anggaran dimulai 1 Januari, sedangkan tahun pelajaran dimulai bulan ketiga bulan Juli.

Dana BOS bergulir berdasarkan tahun anggaran, sedangkan madrasah berjalan berdasarkan tahun pelajaran. Pada bulan Januari, Februari, Maret, ketika madrasah sudah harus berjalan dan dibiayai, anggaran baru dalam proses pengesahan. Kedua, adalah sistem administrasi keuangan yang ketat. Dana BOS diberikan per tri wulan. Tetapi kehadirannya tidak pernah tepat pada awal triwulan. Ada kalanya pada bulan kedua, ada kalanya pada bulan ketiga. Sehingga pada awal triwulan madrasah belum memperoleh dana operasional sedangkan sekolah tetap harus berjalan.

Selain masalah keterlambatan, tersedianya dana BOS yang jumlahnya berdasarkan jumlah siswa menjadikan besaran biaya BOS yang diterima jauh dari kata cukup. Dana BOS yang diterima hanya cukup untuk membiayai tenaga pendidik

honorier dan untuk pembelian buku dengan jumlah terbatas. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan besaran jumlah dari Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RABM) yang jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Madrasah. Jumlah besaran dana BOS yang diterima di MTs Darussalam dalam bulan Januari – Juni 2013 adalah Rp. 24.552.000,-. Adapun berikut ini adalah RABM yang dimiliki oleh MTs Darussalam :

Tabel 4.1.6.2.1 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Ajaran 2013 / 2014

Sekolah	: MTs Darussalam	Format BOS – K1	
Kecamatan	: Patrang	Diisi Sekolah	
Kabupaten	: Jember	Dikirim ke TIM PKPS – BBM Kab/ Kota	

No	Sumber Dana	No	Penggunaan
	Uraian		Uraian
I	Rutin	I	Pengeluaran Operasional
	1. Belanja Pegawai	1.	Belanja Pegawai
	2. Belanja Barang	2.	Belanja Buku BOS
	3. Belanja Pemeliharaan	3.	Belanja Pemeliharaan
	4. Belanja Lain Lain	4.	Belanja Lain
II	Bantuan		
	1. BOS		49.104.000,-
	2. Pemda		2.860.000,-
	3. Bantuan Lain (Yayasan)		5.000.000,-
			10.286.000,-
III	Dana Komite		
	1. Iuran Orang Tua		
	2. Sumbangan Sukarela		
	3. Usaha Lain		
IV	Penerimaan Lainnya		
	1. Iuran.....		
	2. Iuran.....		
	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	
	67.250.000,-	67.250.000,-	

Dari pelaporan pertanggung jawaban yang terdapat di MTs Darussalam dapat disimpulkan bahwa : 1. Dana BOS diterima bukan per triwulan, akan tetapi pada pertengahan tahun yakni di bulan Juni. Hal tersebut tentunya dapat sedikit banyak menghambat keberlangsungan proses KBM di MTs Darussalam yang disebabkan terlambatnya pencairan dana BOS. 2. Dana BOS jika dijumlah per tahun yang diterima masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sesuai RABM MTs Darussalam Jember. Hal itu menyebabkan madrasah harus kreatif dalam memperoleh sumber dana lain untuk pembiayaan operasional madrasah.

#### 4.6.1.3 Penerimaan Siswa Baru

Masukan (input) sekolah dapat dilihat dari kualitas siswa baru di madrasah. Keterkaitan antara jenjang pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP / sederajat) sangat mempengaruhi kompetensi siswa baru. Siswa pada jenjang pendidikan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP / MTs sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di tingkat SMP / MTs, akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan SMP / MTs yang dituju. Selain dampak positif digulirkannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap madrasah ternyata juga menimbulkan persoalan lain.

Salah satunya adalah kompetisi perekrutan siswa baru yang tidak terkontrol. Hal tersebut dipicu ketentuan pengajuan dana BOS yang salah satu di antaranya adalah mensyaratkan jumlah siswa yang perlu dibantu dana BOS. Kewenangan pengajuan tersebut di bawah kewenangan madrasah, untuk menentukan siswa yang memerlukan bantuan. Sehingga untuk mendapatkan bantuan dana BOS dalam jumlah besar menjadi motivasi bagi pihak madrasah untuk menjaring siswa sebanyak-banyaknya. Kompetisi tersebut menimbulkan persaingan yang tidak sehat, madrasah dengan fasilitas sederhana seperti MTs Darussalam semakin ditinggalkan. Terutama sekolah swasta, yang mendapatkan bantuan BOS relatif lebih kecil. Mereka harus bertahan, mengandalkan biaya yang dipungut dari siswa.

Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan untuk menjaring calon siswa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan

jenjang pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian, program BOS dalam kaitannya dengan penerimaan siswa baru sedikit dirasakan manfaatnya baik oleh madrasah maupun orang tua siswa. Hal ini dapat dilihat dari informasi kepala madrasah yang menjelaskan bahwa program BOS cukup efektif pemanfaatannya dalam penerimaan siswa baru di sekolah potensial (MTs Darussalam). Antusias orang tua untuk memasukkan putra putri mereka ke madrasah penerima dana BOS sangat besar, tetapi mereka tetap harus mengeluarkan biaya pendaftaran seperti untuk keperluan seragam, dan formulir. Dapat dikatakan program BOS belum terlaksana dengan efektif di bidang penerimaan siswa baru karena dari madrasah yang diteliti karena madrasah secermat mungkin memanfaatkan dana BOS. Seyogianya pihak madrasah dapat memaksimalkan dana BOS yang diterima, tetapi karena terdesak oleh kebutuhan operasional lainnya yang lebih diprioritaskan, maka madrasah terpaksa membebani orang tua siswa, walaupun untuk mereka biaya tersebut tidak memberatkan.

#### 4.6.1.4 Kemampuan Tenaga Pendidik

Dari segi kegiatan belajar mengajar, banyak indikator yang yang dapat dilihat apakah program BOS efektif atau tidak. Pertama, faktor tenaga pendidik. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswanya. Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Salah satu peruntukan resmi program BOS adalah untuk pembayaran gaji guru honorer. Program BOS efektif jika menyentuh langsung guru honorer. Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Dalam memandang kelanjutan pendidikan, peningkatan prestasi pendidikan harus ditingkatkan, peningkatan ini melalui proses pembelajaran di kelas. Hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi hendaknya bagi setiap warga negara harus dijamin oleh negara, sehingga orang tua cenderung akan memberikan informasi positif tentang dunia pendidikan bagi anak-anaknya kelak, yang akhirnya dapat menentukan pembentukan aspirasi pendidikan. Selain itu perlunya gerakan moral seperti menekankan pembiayaan ditingkat sekolah dasar serendah mungkin.

Tabel 4.6.1.4.1 Daftar Tenaga Pendidik di MTs Darussalam Tahun 2013

No	Nama	Lulusan	Mata Pelajaran	Status
1	Endarto Jaswadi, S.Ag	S1	Quran Hadis	GTY
2	Fitroni Hariadi, S.E	S1	IPS Terpadu	GTY
3	Ani Sulastri, S.Pd	S1	Matematika	GTY
4	Chanifah, S.E	S1	Bahasa Indonesia	GTY
5	Subhan Malik, S.E	S1	TIK	GTY
6	A. Junaidi , S.Pd	S1	Matematika	GTY
7	Neti Sumiati, S.Pd	S1	IPA Terpadu	GTY
8	Siti Rofiah, S.Pd	S1	Bahasa Inggris	GTY
9	Junaidi, S.Pd	S1	Penjaskes	GTY
10	Anas Romzy H	SMA	PKn, B. Arab	GTY
11	Falzah Umayyah Z, M.Si	S2	SKI, Aqidah Akhlaq	GTY
12	Hafidzul Kais, M.Pd.I	S2	Fiqh	GTY
13	Wida Harimoerti	S1	BK, Bahasa Daerah	GTY

Sumber : Data Base MTs Darussalam 2013

Faktor lain guna memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran, juga mendorong peran orang tua untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak dirumah. Hal yang lebih penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal lapangan pekerjaan untuk kesempatan berusaha.

Peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor guru honorer maupun dari penerimaan tambahan bagi guru tetap dan tidak tetap berkaitan dengan peningkatan kegiatan belajar-mengajar. Dengan peningkatan penerimaan ini, ada indikasi bahwa semangat mengajar guru meningkat. Namun, ada juga keluhan di beberapa madrasah bahwa semangat guru tetap agak menurun karena mereka tidak mendapat alokasi dari dana BOS, sedangkan mereka tahu nilai dana BOS cukup besar dan biasanya dari iuran siswa yang jauh lebih kecil saja mereka mendapat alokasi.

Peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti MGMP. Namun, perlu dicatat bahwa dampak kegiatan tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga. Berkaitan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia (guru) di madrasah pada umumnya bersumber dari pembiayaan dana rutin dan dana BOS maupun dana untuk penyelenggaraan pelatihan. Namun demikian prosentase keterlaksanaannya masih berkisar 60 – 80 % sedangkan penyelenggaraannya dilakukan tiap semester. Terhadap keterlaksanaan pembinaan guru di tingkat madrasah pada umumnya memperoleh dukungan dana dari dana BOS. Fenomena ini dianggap telah memberikan iklim yang baik terhadap peningkatan guru berbasis madrasah dengan pemanfaatan dana BOS. Peningkatan mutu guru juga selalu dibarengi dengan monitoring guru oleh kepala madrasah secara berkala. Adapun pelatihan peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik yang telah dan pernah diikuti oleh MTs Darussalam adalah Pelatihan RPP dan Silabus berkarakter bangsa, Pelatihan MGMP, Pelatihan kognitif dan media belajar siswa, Pelatihan KSM bidang Eksak dan lain lain.

#### 4.6.1.5 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk kelengkapan program cukup lengkap, ditandai dengan adanya alat bantu untuk pelaksanaan program BOS seperti komputer, printer, dan arsip yang dikelola dengan sistematis serta tersedianya fasilitas ruang pertemuan. Struktur organisasi dan manajemen program BOS cukup baik, seperti halnya mekanisme yang berjalan di dalam organisasi. Struktur program BOS adalah terdiri dari kepala madrasah, bendahara dan komite sekolah, mekanisme kerja dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi dan manajemen organisasi, seperti adanya ketua, bendahara, sekretaris dan staff yang terlibat tersebut senantiasa mengadakan pertemuan untuk menjalankan dan menyalurkan dana BOS sebagaimana mestinya.

Sarana prasarana madrasah ikut berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran di madrasah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya program BOS berjalan cukup efektif, jika dilihat dari salah satu komponen pendukungnya yaitu sarana prasarana yang menunjang, hanya saja masih ditemui kendala dalam pembelian buku teks pelajaran. Dana BOS yang digulirkan ternyata tidak mencukupi pembelian buku teks pelajaran matematika, IPA dan IPS. Kenaikan jumlah nominal dana BOS, ternyata tidak dirasakan oleh madrasah, terlebih lagi siswa, akibat keterbatasan tersebut sekolah hanya mampu membeli buku dimana jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa, atau membeli buku sejumlah siswa tetapi dengan kualitas buku yang rendah. Untuk itu hendaknya sarana prasarana dikelola dengan baik. Beberapa poin penggunaan dana BOS diperuntukkan bagi pengadaan sarana prasarana, misal pembelian komputer, alat tulis, atau pemeliharaan/perawatannya.

Lebih lanjut lagi, solusi yang diajukan oleh pemerintah dalam masalah buku adalah dengan mengunduh buku melalui electronic book (e-book), tetapi ternyata hal tersebut bukan merupakan solusi tepat karena kualitas e-book tersebut nilai memiliki kualitas yang rendah. Tak kalah pentingnya, target program BOS yang lain adalah membiayai buku pelajaran pokok dan penunjang serta buku perpustakaan. Sayangnya, untuk komponen ini seluruh responden orangtua mengatakan biaya yang harus

dikeluarkan untuk membeli buku pelajaran sama saja, sebelum dan sesudah adanya BOS. Agaknya, madrasah mengalokasikan sebagian besar dana BOS untuk membayar atau meringankan uang sekolah siswa, bukan untuk meringankan pembelian buku pelajaran. Padahal, orangtua mengharapkan dengan adanya BOS bisa meringankan biaya untuk membeli buku pelajaran. Harga buku sekarang kian mahal. Sebagai contoh, untuk satu paket buku kelas VII satu semester, orangtua di MTs Darussalam Jember harus mengeluarkan uang iuran perbulan Rp. 25.000,- belum lagi ditambah beban 12 Lembar Kerja Siswa, masing-masing Rp 9.000,- yang harus dimiliki tiap siswa.

Kecilnya manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran boleh jadi karena secara nominal dana yang diberikan pada madrasah memang kecil. Atau bisa juga karena pihak madrasah tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuannya. Hal ini bisa saja terjadi karena mekanisme kontrol dari pemerintah dan komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan orangtua masih lemah. Atau bisa saja karena tidak ada transparansi dari pihak madrasah mengenai penggunaan uang BOS. Bahkan, menurut cerita salah seorang orangtua murid, ketika menanyakan penggunaan uang BOS ke madrasah, pihak madrasah menjawab penjelasannya menyusul saat kenaikan kelas.

Peningkatan ketersediaan peralatan dan bahan ajar, baik yang habis pakai seperti spidol boarmarker maupun yang tidak habis pakai seperti peta, bola, peralatan keterampilan, penggaris dan sebagainya, masih kurang. Di MTs Darussalam Jember peningkatan ini sangat terasa karena dengan biaya operasional yang sangat minim sebelum adanya BOS, bahkan spidol saja seringkali habis refill sehingga guru jarang menulis di papan tulis dan murid juga jarang disuruh mengerjakan tugas di papan tulis. Oleh karenanya, kegiatan belajar-mengajar menjadi sangat membosankan.

Dengan peningkatan sarana bahan ajar, guru menjadi lebih bersemangat dan bebas dalam menerapkan berbagai teknik mengajar. Namun, peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kemampuan guru.

#### 4.6.1.6 Peraturan Terkait

Suatu kebijakan publik, harus dilandaskan pada peraturan-perundangan otoritatif. Demikian juga program BOS perlu memiliki legitimasi sebagai rujukan dalam pengelolaan. Menurut Dye (1995:25), Suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik kalau ia dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Mengenai belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang program BOS, sebenarnya dapat disikapi dengan tetap mengacu pada peraturan yang telah terbit pada saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013

#### 4.6.1.7 Harapan Para Pihak

Tujuan awal digulirkannya bantuan operasional sekolah (BOS) adalah membantu membebaskan biaya yang dibebankan kepada murid dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pada tingkat dasar. Dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah. Pada tahun ajaran 2012/2013, jumlahnya mencapai Rp 12,5 triliun. Bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, BOS diandalkan untuk menyingkirkan hambatan keuangan yang selama ini menjadi penghalang dalam mendapat layanan pendidikan.

Berbagai pungutan yang biasa dibebankan oleh madrasah, mulai pendaftaran hingga kelulusan, diharapkan akan hilang. Namun, walau telah delapan tahun bergulir, BOS belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Masih saja ada kekurangan-kekurangan lain, misal minimnya dana yang diberikan, ketidaktepatan waktu penyaluran, sampai monitoring dan evaluasi yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyaluran dana BOS secara tepat waktu merupakan harapan masyarakat dan kesungguhan pemerintah. Supaya terlaksana sesuai harapan, yang terlibat di

dalamnya harus ikut mengawal demi keadilan dan pemerataan dalam memperoleh jaminan pendidikan. Naiknya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN berimplikasi naiknya dana BOS. Tahun 2013 dana bagi MI / PPS Ula di Kota : Rp. 400.000,- / siswa / tahun ; MI / PPS Ula di Kabupaten : Rp. 397.000,- / siswa / tahun ; MTs / PPS Wustho di Kota : Rp. 575.000,- / siswa / tahun ; MTs / PPS Wustho di Kabupaten : Rp. 570.000,- / siswa / tahun.

Program BOS yang digagas pemerintah memang akan sulit memenuhi harapan masyarakat khususnya warga miskin yang masih memiliki beban ekonomi keluarga meski dana BOS telah naik hingga 50% pada tahun ini. Oleh karena sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, beban pembiayaan pendidikan juga ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember. Jika pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN sebanyak 20% untuk sektor pendidikan maka Pemkab seharusnya berkontribusi yang sama yakni menyisihkan 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang pendidikan.

Dari daftar kebijakan BOS tahun 2013, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud setidaknya memberikan 3 peran penting kepada Pemkab. Pertama, Pemkab wajib memenuhi kekurangan biaya operasional BOS melalui APBD jika dana BOS dari kemendikbud tidak mencukupi. Kedua, Pemkab wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar. Dan ketiga, Pemkab wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di Madrasah swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan terhadap siswa yang mampu.

Dari kebijakan diatas, peran Pemkab cukup strategis terutama untuk menjamin kesediaan dana BOS bila tidak mencukupi melalui mekanisme anggaran APBD-nya. Meski diakui tidak semua pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersedia menyisihkan 20% anggaran APBD untuk sektor pendidikan.

#### 4.6.2 Pencapaian Proses

Dalam pencapaian proses merujuk dari teori evaluasi program Bruce W. Tuckman, dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Pelaksanaan program BOS diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Untuk itu, sebagai dasar untuk dapat melaksanakan program sesuai juklak/juknis maka dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat terhadap juklak/juknis dimaksud.

Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana BOS, dana BOS harus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan dana BOS didasarkan atas kesepakatan antara madrasah dengan Komite sekolah.

Mengenai pengelolaan dana BOS menurut kepala madrasah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala madrasah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala madrasah juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta melengkapi sarana madrasah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran yang mencapai 60% dan buku pelajaran mencapai 55%, selanjutnya diperlukan untuk mengadakan LKS dan media elektronik.

Sebagai dampak dari pengelolaan madrasah dengan dukungan dana BOS, kepala madrasah menyatakan prestasi madrasah yang bersangkutan meningkat. Hal merupakan hasil yang menggembirakan, karena penyelenggaraan madrasah dengan bantuan dana BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik.

#### 4.6.3 Pencapaian Hasil (Output)

Pencapaian hasil dalam pemanfaatan program BOS dapat diindikasikan dari pertama, apakah dana BOS yang disalurkan dapat meringankan beban orang tua siswa. Kedua, berkaitan dengan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dapat diamati pencapaian sekolah dalam prestasi siswa, baik dalam bidang akademis dan non akademis.

##### 4.6.3.1 Keringanan biaya sekolah bagi orang tua siswa

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang tua siswa, bahwa program BOS meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung, terutama SPP. Walaupun terkadang masih ada pungutan/iuran yang diminta oleh pihak madrasah, tetapi frekuensinya minimal sekali. Pendidikan dasar merupakan industri hulu yang harus memiliki mutu memadai, sehingga kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan dana tersebut, tak ada alasan bagi orang tua untuk enggan menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Karena, para orang tua tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam pada setiap tahun ajaran baru untuk anak-anaknya yang akan bersekolah. Sebagaimana diketahui, bahwa di MTs Darussalam Jember, pihak madrasah hanya menarik iuran sekolah perbulannya sebesar Rp. 25.000,- untuk menunjang kelancaran operasional dan kebutuhan harian sekolah.

Kebijakan penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar 50% pada tahun anggaran berikutnya, harus disikapi serius oleh madrasah. Jangan sampai, alokasi anggaran tersebut nantinya tidak tepat sasaran dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

##### 4.6.3.2 Mutu Pendidikan

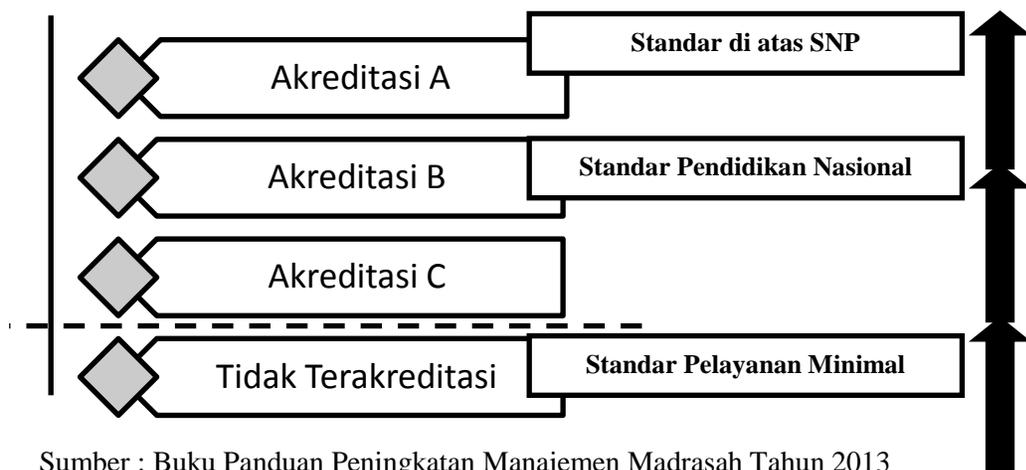
Di era persaingan global, Indonesia memerlukan sumberdaya manusia (SDM) paripurna. Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. karena itu, pendidikan sebagai jalur utama

pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Dalam kaitan ini, mutu pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu untuk memacu peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar 9 tahun, diharapkan program BOS dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi tentang ketentuan delapan standar yang dicita citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu.

Masih dalam kerangka mutu pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang ada dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dalam wujud penilaian akreditasi, MTs Darussalam memperoleh nilai akreditasi secara keseluruhan yang cukup memuaskan yakni akreditasi B dari predikat sebelumnya yakni C.

Gambar 4.6.3.2.1 Alur Akreditasi Madrasah Sesuai Tingkatan



Sumber : Buku Panduan Peningkatan Manajemen Madrasah Tahun 2013

#### 4.6.3.3 Prestasi Siswa

Kemampuan/potensi siswa merupakan dasar utama bagi pencapaian prestasi. Kemampuan/potensi yang dimiliki siswa apabila dapat dikembangkan ke arah yang positif akan berdampak pada prestasi madrasah juga. Sedangkan dalam pengaruh pemanfaatan program BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di madrasah lokasi penelitian mempunyai dampak/pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa

Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS kepala madrasah menyatakan prestasi sekolah meningkat. Hal merupakan hasil yang menggembirakan, karena penyelenggaraan madrasah dengan bantuan dana BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik. Hasil positif dari kepala madrasah yang lain adalah angka putus sekolah yang diakibatkan oleh biaya pendidikan telah berkurang signifikan di lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas nampak kaitan yang erat antara penggunaan dana BOS dengan indikator mutu pendidikan. Madrasah yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan tingkat satuan madrasah (KKM) diharapkan dapat memanfaatkan dana BOS untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi sarana pembelajaran yang dibutuhkan.

Dengan demikian nampak kebermanfaatan dana BOS bagi peningkatan kualitas kegiatan dan mutu pendidikan di madrasah. Indikator terpenting lainnya adalah tidak terdapatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh keberatan orang tua membayar iuran sekolah. Dampak lain yang diperoleh melalui wawancara adalah tingginya semangat belajar akibat dorongan semakin banyaknya kegiatan madrasah akibat dukungan dana BOS.

#### **4.7 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BOS**

Dalam pelaksanaannya, program BOS tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer, program BOS mendapat berbagai respon, baik dari jajaran birokrasi, siswa, orangtua siswa maupun

masyarakat. Seperti halnya program pemerintah lain, program BOS menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan.

#### 4.7.1 Sosialisasi Program BOS

Pertama adalah minimnya sosialisasi kepada orangtua siswa yang seharusnya dilakukan oleh pihak madrasah. Dikatakan minim karena MTs Darussalam Jember mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi terbatas hanya untuk kalangan tertentu, yaitu komite sekolah, Adapun sosialisasi tersebut diadakan oleh pihak kemenag dalam hal ini dibawah oleh seksi Mapenda kemudian diteruskan dari Tim BOS MTs Darussalam Jember kepada Komite Sekolah dan beberapa wali murid saja. Sangat disayangkan karena komite sekolah pada umumnya adalah orang tua siswa yang bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk menjelaskan pada orang tua siswa lainnya secara menyeluruh jika tidak difasilitasi oleh madrasah tersebut. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.

Di antara berbagai tahapan pelaksanaan Program BOS, secara umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan. Berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi dalam program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kekurangan dalam mekanisme penyampaian materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat madrasah. Selain itu, permasalahan sosialisasi yang paling banyak dikemukakan adalah ketidakkonsistenan antara pesan yang disampaikan melalui media massa dengan materi sosialisasi internal program, khususnya mengenai pembebasan iuran siswa.

Dengan keterbatasan dana, waktu, dan media sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan, dan penanganan pengaduan.

Pernyataan dari pihak madrasah menyebutkan bahwa tidak di poskan anggaran untuk mensosialisasikan program BOS. Akibatnya timbul miskomunikasi di kalangan orang tua siswa. Misalnya mengenai peruntukan resmi BOS, orang tua siswa beranggapan bahwa BOS tidak hanya membebaskan mereka dari biaya SPP setiap bulannya, tetapi juga biaya pribadi siswa seperti seragam dan transportasi. Padahal BOS hanya meringankan beban operasional sekolah. Selain itu, peruntukan resmi BOS yang terdiri dari 14 poin dipahami oleh orang tua siswa harus terpenuhi, padahal keadaan riil madrasah berbeda-beda antara satu dengan lainnya. 14 poin peruntukan resmi program BOS tidak mungkin dipenuhi seluruhnya oleh madrasah. Sebagai contoh, pos penggunaan dana BOS terbesar di MTs Darussalam adalah untuk honorarium guru honorer / guru tetap yayasan karena jumlah guru honorer mereka adalah mayoritas. MTs Darussalam hanya memanfaatkan media komunikasi terbatas saja seperti halnya jika terdapat wali murid yang bertanya, maka baru akan dijelaskan.

#### 4.7.2 Pencairan Dana BOS

Hambatan lainnya adalah periode pencairan dana yang tidak tepat waktu. Dana BOS yang diturunkan setiap 3 bulan sekali kerap kali dapat cair pada bulan ke dua bahkan bulan ke enam. Keterlambatan tersebut mengakibatkan madrasah harus mencari pinjaman guna menutupi biaya operasional. MTs Darussalam yang berdiri di bawah naungan yayasan Darussalam harus mengandalkan kemampuan finansial yayasan yang terbatas untuk menyambung keberlangsungan kegiatan belajar di madrasah saat pencairan dana BOS mengalami keterlambatan.

Melemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan program BOS seperti mata uang yang memiliki dua sisi, di satu sisi, penurunan atau bahkan pembebasan iuran sekolah bisa dianggap sebagai dampak positif yang sesuai dengan tujuan program, tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa bantuan ini justru mengurangi keswadayaan masyarakat dan partisipasi berbagai pihak lain dalam pembiayaan pendidikan.

#### 4.7.3 Monev tidak berkala

Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan tidak berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut.

#### Faktor-Faktor yang Diamati Sumber Data Hasil Penelitian Penilaian

<b>Faktor Faktor Yang Diamati</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penilaian</b>
Evaluasi program menurut Tuckman dipengaruhi oleh masukan, proses, maupun keluaran program			
MASUKAN (INPUT) PROGRAM 1. SDM 2. Dana BOS 3. Sarana Prasarana 4. Penerimaan Siswa Baru 5. Peraturan terkait 6. Harapan para pihak	- Kasi Mapenda Kemenag Kabupaten Jember - Kepala Madrasah - Orang tua siswa - Pemerhati pendidikan	1. SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS berlatar belakang S1, pengalaman mengelola biaya pendidikan selama lebih dari 5 tahun, kualifikasi pendidikan guru sebagian besar telah sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, aktif dalam berpartisipasi di diklat/MGMP mata pelajaran 2. Penyaluran dana BOS sering dikeluhkan karena tidak tepat waktu, tetapi prosedur penyaluran telah disusun sederhana oleh pemerintah agar madrasah tidak mengalami kesulitan dalam menyusun proposal permohonan dana BOS, alur	Benar adanya bahwa dalam pendidikan, unsur input dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk diantaranya dana, sarana prasarana, maupun kualitas siswa  Hasil wawancara dengan Kasi Mapenda Kemenag Kabupaten Jember, bahwa peraturan terkait dan harapan para

---

birokrasi telah dipangkas sehingga dapat menghemat waktu, MTs Darussalam transparan dalam memberikan penjelasan seberapa besar dana BOS yang diterima.	pihak merupakan salah satu masukan bagi pelaksanaan program BOS di masa yang akan datang
--	--

3. Sarana prasarana pendukung program dilengkapi dengan komputer, printer, arsip yang tertata bahkan ruang pertemuan. Sarana prasarana KBM di madrasah, baik perawatan maupun pengadaan/penambahan kuantitasnya salah satu sumber dananya adalah dana BOS

4. Penerimaan siswa baru dilakukan melalui tes potensi akademik dan nilai standar minimal Ujian Nasional dalam menjaring calon siswa yang berkompeten

5. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah belum merinci setiap detail pelaksanaannya, hanya menjabarkan peruntukkan resmi dana BOS

6. Harapan sebagian informan adalah penyaluran dana BOS agar tepat waktu dan alokasi jumlahnya dapat ditambah, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi agar ada

---

		feedback bagi pihak madrasah sebagai pelaksana	
PROSES PROGRAM Kesesuaian antara pelaksanaan dengan juklak dan juknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Mapenda</li> <li>- Kepala Madrasah</li> <li>- Orang Tua Siswa</li> <li>- Pemerhati Pendidikan</li> </ul>	Pihak madrasah telah sesuai menggunakan dana BOS sesuai dengan peruntukkan resminya yang tercantum dalam juklak pelaksanaan program BOS yang diterbitkan pemerintah, hanya saja pembagian pos anggaran masih belum proporsional antara satu dengan yang lainnya	Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kemenag Kabupaten Jember bahwa kesesuaian antara juklak dengan pelaksanaan program dan pemahaman para pihak terkait terhadap juklak tersebut sangat mempengaruhi proses program
KELUARAN (OUTPUT) 1. Prestasi akademis dan non akademis siswa 2. Keringanan biaya operasional sekolah bagi siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Mapenda</li> <li>- Kepala Madrasah</li> <li>- Orang Tua Siswa</li> </ul>	<p>1. Prestasi akademis yang diraih siswa sangat bervariasi, diantaranya nilai ujian dengan rata-rata nilai terendah 7,5. Untuk prestasi non akademis siswa banyak dibidang ekstra kurikuler seperti bidang tilawatil quran, kesenian dan olahraga</p> <p>2. MTs Darussalam Memberikan keringanan dengan menurunkan biaya SPP, biaya operasional sekolah lainnya seperti pembelian komputer tidak lagi dibebankan pada siswa</p>	Output pendidikan dapat diteliti dari pencapaian prestasi siswa Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda bahwa keringanan biaya operasional sekolah adalah output yang ingin dicapai dari program BOS

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, telah diketahui dan dapat disimpulkan efektivitas implementasi program BOS di MTs Darussalam Jember tahun 2013 berjalan cukup efektif. Rincian kesimpulannya sebagai berikut:

1. Input program BOS
  - a. Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program BOS cukup baik, dapat memahami peraturan, juklak maupun juknis.
  - b. Untuk Penerimaan Siswa Baru Pemanfaatan terhadap Dana BOS tidak maksimal.
  - c. Program BOS telah meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam mengajar dengan mengikuti pelatihan MGMP.
  - d. Sarana prasarana di MTs Darussalam telah cukup untuk menunjang pelaporan program, berikut sarana KBM yang ada. Untuk alokasi BOS buku belum efektif.
  - e. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang pendanaan pendidikan dan SE Mendiknas Nomor 186/MPN/KU/2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 cukup efektif dan jelas sebagai dasar pelaksanaan.
2. Proses program BOS
  - a. Merujuk pada teori evaluasi Bruce W Tuckman, terlihat kesesuaian pada Juklak dan Juknis program BOS dengan pelaksanaan program tersebut di MTs Darussalam Jember dan dampak program BOS nyata dirasakan masyarakat dan peserta didik.
3. Output program BOS

- a. Program BOS sudah dapat memberikan keringanan kepada Orang Tua peserta didik terhadap biaya yang harus ditanggung.
  - b. Pemanfaatan BOS dalam peningkatan mutu pendidikan menjadikan madrasah dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan bukti peningkatan hasil akreditasi oleh BAN-SM dari C ke akreditasi B.
  - c. Pemanfaatan dana BOS dilakukan dengan baik untuk menunjang prestasi siswa baik akademik maupun non akademik.
4. Hambatan- hambatan dalam implementasi Program BOS sebagai berikut :
- a. Minimnya Sosialisasi dari Pihak Madrasah
  - b. Pencairan dana BOS yang sering terlambat
  - c. Monitoring dan Evaluasi program tidak dilakukan secara berkala

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman dana BOS, sebaiknya madrasah harus menyiapkan dana cadangan untuk operasional.
- b. Untuk pemaksimalan penerimaan siswa baru, sebaiknya ada alokasi dana khusus yang disiapkan madrasah diambil dari dana BOS.
- c. Untuk pemaksimalan pengadaan BOS buku, sebaiknya pemerintah lebih baik memberi bantuan dana khusus untuk buku, tidak menjadi satu dalam dana BOS.
- d. Untuk efektifnya sosialisasi peruntukan dan penggunaan dana BOS, sebaiknya madrasah mengadakan pertemuan rutin wali murid perjenjang di tiap semester dengan agenda khusus sosialisasi BOS.
- e. Untuk terlaksananya Monitoring dan Evaluasi secara berkala, sebaiknya madrasah menjadwalkan konsultasi komunikatif dengan tim monitoring dan evaluasi Kemenag Kabupaten/ Kota bersama komite sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi dan Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dirjen Pendidikan Agama. 2012. *Juknis Pelaksanaan BOS pada Madrasah dan PPS Tahun Anggaran 2013*. Jakarta: Kemenag RI.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice- Hall International, Englewood Cliffs.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hadi, Sutrisno. 1979. *Metodologi Research 3*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia
- Julia, Sopia. 2010. *Efektifitas Program, Suatu Tinjauan Atas Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Kemenag RI. 2012. *Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Untuk Tahun 2013*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Madrasah: Kemenag RI.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2008. *Metode Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2A LAN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant.2006.*Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Elex Komputindo.
- Prasetya, Irawan.2006.*Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Depok : Penerbit Indonesia University Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi*. 2006. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tayibnapi, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: CV. Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. 2008.*Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

**Jurnal:**

- Anwar, M. Idochi. 1991. "Biaya Pendidikan dan Metode Biaya Penetapan Biaya Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 10:1 (1991): 28-31.
- Bajari, Abner Henry. 2014. *Konsep Kebijakan Publik dan Sosial Budaya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ilmu Sosial Volume 12 no. 1 April 2014
- Suharyo, Widjayanti I. dan Widyanti, Wenefrida. 2006. "Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Akses Terhadap Pendidikan Dasar Bagi Masyarakat Miskin" dalam SMERU. Jakarta SMERU: The SMERU Research Institute/ Lembaga Penelitian SMERU.
- Susetyo, Budi. 2006. "Sekilas Tentang Perjalanan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)" dalam SMERU. Jakarta SMERU: The SMERU Research Institute/ Lembaga Penelitian SMERU.

Lapagu, Riswan. 2006. "BOS: Solusi Tepat Untuk Masalah-Masalah Pendidikan di Indonesia?" dalam SMERU. Jakarta SMERU: The SMERU Research Institute/ Lembaga Penelitian SMERU.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Pengkajian Efektifitas BOS Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia.1945. *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, Surabaya: PT. Aneka Ilmu

Depdiknas. 2003. *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas RI.

Kemendagri. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Jakarta: Kemendagri RI.

Kemendiknas. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan*, Jakarta: Kemendiknas RI.

Kemendiknas. 2009. *Peraturan Mendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009*, Jakarta: Kemendiknas RI.

Kemenkeu. 2010. *Undang Undang Reublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011*, Jakarta: Kemenkeu RI.

Kemenkeu. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Kemenkeu RI.

**Internet:**

BPKP. 2013. *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM*. [www.bpkp.co.id](http://www.bpkp.co.id)

Smeru. 2013. *Sasaran dan Alokasi Dana BOS se – Indonesia*. [www.smeru.org](http://www.smeru.org)

Media Indonesia. 2013. *Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Jember*.  
[http://www.mediaindonesia.com/read/2013/01/01/292847/289/101/Dana\\_BO\\_S\\_Jember\\_Cair](http://www.mediaindonesia.com/read/2013/01/01/292847/289/101/Dana_BO_S_Jember_Cair)

- Okezone.com. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*.  
[http://news.okezone.com/read /2013/ 11/ 10/ 337/ 527526/ ipm-indonesia-rendah tampan-bagi-pemerintah](http://news.okezone.com/read/2013/11/10/337/527526/ipm-indonesia-rendah-tampan-bagi-pemerintah)
- Wikipedia.com. 2013. *Pengertian Indeks Pembangunan Manusia*.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia)
- Wikipedia.com. 2013. *Pengertian Evaluasi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>
- Schemerhon . 2013. *Artikel tentang Efektifitas* .  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21347/4/Chapter%20II.pdf>
- Kojingtechnolog. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. [http://kojingtechnolog.Wordpress .com / 2010 / 09 / 14 / evaluasi – program - pendidikan/](http://kojingtechnolog.Wordpress.com/2010/09/14/evaluasi-program-pendidikan/)
- Arali. 2013. *Pentingnya Logical Framework – Analisis Kerangka Kerja Logis*.<http://Pentingnya Logical framework –Kerangka Kerja Logis – DalamPenyelenggaraan Program Opini dari Fakta Empiris.html>
- Tangkilisan. 2013. *Aspek Program*.  
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17736/4/Chapter2.pdf,](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17736/4/Chapter2.pdf)

## LAMPIRAN

### **PEDOMAN WAWANCARA EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MTs DARUSSALAM JEMBER TAHUN 2013**

Informan : Kepala Madrasah

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Pemahaman tentang program BOS
  - a. Pengertian Program BOS
  - b. Sumber Dana BOS
  - c. Bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program BOS
  - d. Bentuk partisipasi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang ideal untuk mensukseskan program BOS
2. Pelaksanaan program BOS
  - a. Kondisi madrasah sebelum dan sesudah adanya program BOS
  - b. Proses dan mekanisme implementasi program BOS ditingkat madrasah
3. Pemanfaatan program BOS
  - a. Peranan program BOS dalam mendukung proses belajar mengajar di madrasah
  - b. Peranan program BOS dalam mendukung keberhasilan prestasi akademis siswa di madrasah
4. Hambatan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program BOS
  - a. Penjelasan mengenai prosedur yang sebenarnya tidak diperlukan dalam pelaksanaan program ini, namun tetap diberlakukan
  - b. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi program BOS di madrasah
  - c. Upaya upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut

- d. Bentuk antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah bilamana terjadi hambatan/ masalah

Informan : Orang Tua Siswa

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Pemahaman tentang program BOS
  - a. Pengertian Program BOS
  - b. Sumber Dana BOS
  - c. Bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program BOS
  - d. Bentuk partisipasi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang ideal untuk mensukseskan program BOS
2. Pelaksanaan program BOS
  - a. Kondisi yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya program BOS
  - b. Manfaat yang diterima dari Program BOS
  - c. Bentuk sosialisasi yang harus diadakan oleh madrasah untuk mensukseskan pelaksanaan program BOS
3. Pemanfaatan program BOS
  - a. Letak keunggulan program BOS khususnya dalam peningkatan prestasi siswa
  - b. Penilaian orang tua siswa tentang pemanfaatan dana BOS dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di madrasah
  - c. Penilaian orang tua siswa tentang pemanfaatan dana BOS terhadap kelangsungan pendidikan siswa
4. Hambatan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program BOS
  - a. Kekurangan – kekurangan yang dinilai masih belum terpenuhi dalam program BOS
  - b. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi program BOS di madrasah

- c. Upaya upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut
- d. Penilaian orang tua siswa mengenai bentuk antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah hambatan/ masalah yang mungkin dapat terjadi
- e. Harapan dan saran orang tua siswa untuk perbaikan program BOS yang akan datang

Informan : Kasi Mapenda Kementrian Agama

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Pemahaman tentang program BOS
  - a. Pengertian Program BOS
  - b. Sumber Dana BOS
  - c. Bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program BOS
  - d. Bentuk partisipasi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang ideal untuk mensukseskan program BOS
2. Pelaksanaan program BOS
  - a. Kondisi madrasah sebelum dan sesudah adanya program BOS
  - b. Proses dan mekanisme implementasi program BOS ditingkat madrasah
3. Pemanfaatan program BOS
  - a. Sejauhmana pemanfaatan program BOS dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di madrasah
  - b. Sejauhmana pemanfaatan program BOS terhadap kelangsungan pendidikan siswa
4. Hambatan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program BOS
  - a. Penjelasan mengenai prosedur yang sebenarnya tidak diperlukan dalam pelaksanaan program ini, namun tetap diberlakukan

- b. Hambatan yang ditemui dalam implementasi program BOS di madrasah
- c. Upaya upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut
- d. Pendapat mengenai bentuk antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah hambatan/ masalah yang mungkin dapat terjadi

Informan : Pemerhati Pendidikan

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Pemahaman tentang program BOS
  - a. Pengertian Program BOS
  - b. Sumber Dana BOS
  - c. Bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program BOS
  - d. Bentuk partisipasi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang ideal untuk mensukseskan program BOS
2. Pelaksanaan program BOS
  - a. Penilaian mereka mengenai pelaksanaan program BOS di Kecamatan Patrang
  - b. Bentuk partisipasi masyarakat untuk turut mendukung suksesnya program BOS
  - c. Bentuk program BOS yang ideal agar dapat terlaksana dengan sempurna
3. Pemanfaatan program BOS
  - a. Penilaian mereka tentang pemanfaatan dana BOS dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di madrasah
  - b. Penilaian mereka tentang pemanfaatan program BOS terhadap kelangsungan pendidikan siswa
4. Hambatan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program BOS

- a. Hambatan yang sekiranya ditemui dalam implementasi program BOS
- b. Upaya upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut
- c. Penilaian mereka mengenai bentuk antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah hambatan/ masalah yang mungkin dapat terjadi
- d. Harapan dan saran untuk perbaikan program BOS yang akan datang